



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT KERJA KOMISI VI DPR RI
DENGAN MENTERI KOPERASI DAN UKM RI**

Tahun Sidang	: 2023-2024
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke-	: 6 (Enam)
Jenis Rapat	: Raker
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Selasa, 19 Maret 2024
Waktu	: Pukul 15.44 s.d. 17.56 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. 1, Jl. Jend. Gatot Suroto, Jakarta 10270
Ketua Rapat	: M. Sarmuji, S.E., M.Si (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/F- PG)
Acara	: Pembahasan terkait: 1. Evaluasi Kinerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023 2. Lain-lain.
Sekretaris Rapat	: Dewi Resmini, S.E., M.Si. (Kabag Sekretariat Komisi VI DPR RI)
Hadir	: A. ANGGOTA DPR RI 30 dari 55 orang Anggota dengan rincian:

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN (F-PDIP):**

10 dari 12 orang Anggota

1. Aria Bima
2. Adisatrya Suryo Sulisto
3. Prof. Assc. Dr. Darmadi Durianto, S.E.,
M.B.A.
4. Rieke Diah Pitaloka
5. ST. Ananta Wahana, S.H., M.H.
6. Sonny T. Danaparamita
7. Ir. Deddy Yevry Hanteru Sitorus, MA.
8. Dr. Evita Nursanty, M.Sc.
9. dr. H. Mufti A.N. Anam
10. Ir. Harris Turino, M.Si., S.H.

**2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
(F-PG)**

4 dari 8 orang Anggota

1. M. Sarmuji, S.E., M.Si.
2. H. Singgih Januratmoko, S.K.H., M.M.
3. Nusron Wahid
4. Drs. H. Dadang S. Muchtar

**3. FRAKSI PARTAI GERINDRA
(F-P. GERINDRA)**

6 dari 8 orang Anggota

1. Mohamad Hekal, M.B.A.
2. M. Husni, S.E., M.M.
3. Khilmi
4. M. Husein Fadlulloh, B. Bus., M.M., MBA.
5. Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M.
6. Mulan Jameela

**4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT
(F-P. NASDEM)**

2 dari 6 orang Anggota

1. H. Rudi Hartono Bangun, S.E., M.A.P.
2. H. Subardi, S.H., M.H.

**5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
(F-PKB)**

1 dari 6 orang Anggota

1. Faisol Riza, S.S.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

4 dari 5 orang Anggota

1. Dr. Ir. Herman Khaeron, M.Si.
2. Muslim, SHI., M.M.
3. Hj. Melani Leimena Suharli
4. Dr. Edhie Baskoro Yudhoyono, B.Coom, M.Sc.

**7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
(F-PKS)**

1 dari 4 orang Anggota

1. Hj. Nevi Zuairina

**8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
(F-PAN)**

2 dari 4 orang Anggota

1. Abdul Hakim Bafagih
2. Hj. Intan Fauzi, S.H., LLM

**9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN (F-PPP)**
0 dari 2 orang Anggota
-

B. UNDANGAN

Menteri Koperasi dan UKM RI (Teten Masduki)
beserta jajaran

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, SE., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Menteri Koperasi dan UKM, Bapak Teten Masduki beserta jajaran,

Puji syukur marilah kita *haturkan* kehadiran Allah *Subhanahu wa taala*, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas karunia-Nya, pada sore hari ini kita bisa hadir dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Koperasi dan UKM dalam keadaan sehat *wal afiat*.

Menurut laporan Sekretariat, hari ini, rapat ini ditandatangani 28 orang, izin 17, jumlah fraksi 7 dari 52, 55 anggota, karena itu sudah memenuhi kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) peraturan DPR RI tentang tata tertib. Oleh karena itu, izinkan kami membuka rapat kali ini dan saya nyatakan terbuka untuk umum.

Bismillahirrahmanirrahim,

(RAPAT:TERBUKA)
(RAPAT DIBUKA PUKUL 15.44 WIB)

Kita sepakati dulu, kita rapat sampai jam berapa, Pak Harris? Setengah enam ya? Ya jam 17.30 ya, mudah-mudahan bisa kita selesaikan.

(RAPAT:SETUJU)

Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Menteri dan seluruh jajaran, atas kesediaan menghadiri rapat kerja pada hari ini. Sesuai dengan undangan yang kami sampaikan, rapat hari ini akan membahas tentang Evaluasi Kinerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tahun 2023, apalagi ini sudah di penghujung masa jabatan presiden dan kabinet, tentu evaluasi kinerja ini menjadi sesuatu yang sangat berarti bagi kita semua. Seperti kita ketahui, Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2023 berkomitmen untuk meningkatkan kinerjanya dengan cara melakukan pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan Koperasi dan UKM agar tetap bisa menyediakan lapangan kerja dan sumber pendapatan bagi masyarakat.

Komisi VI DPR RI senantiasa mendukung tujuan dan sasaran kinerja Kementerian Koperasi dan UKM RI, di antaranya mendorong percepatan terwujudnya tujuh sasaran program prioritas tahun 2023 yang ingin dicapai yaitu:

1. Pendataan lengkap KUMKM;
2. Program rumah produksi bersama;
3. Pengembangan kewirausahaan nasional;
4. Pengembangan rumah kemasam bagi pelaku UMKM;
5. Redesain PLUT KUMKM melalui optimalisasi fungsi 87 PLUT dan KUMKM *existing*;
6. Pengentasan kemiskinan ekstrem; dan
7. Koperasi modern, termasuk korporat isasi pangan, pengawasan koperasi dan revisi Undang-Undang Koperasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rapat kerja hari ini kami harapkan dapat disampaikan progres-progres kinerja kementerian dan penyerapan anggaran dan kinerja kementerian pada tahun 2023 beserta kendala dan solusi yang diharapkan secara bersama-sama.

Untuk mempersingkat waktu kami persilakan pada Pak Menteri untuk bisa menyampaikan paparannya, kami persilakan.

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (Drs. TETEN MASDUKI):

Baik, terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,

**Yang saya hormati Pimpinan, dan
Para Anggota Komisi VI DPR RI,**

Pertama-tama kami perkenankan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa pada Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

**Pimpinan, dan
Anggota Komisi VI DPR RI yang kami hormati, dan
Hadirin yang berbahagia,**

Sebagaimana undangan rapat kerja yang disampaikan kepada kami dengan agenda pembahasan evaluasi kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2023, dapat kami jelaskan sebagai berikut:

a. Mengenai capaian RPJMN dan Renstra tahun 2020-2024.

Sebagaimana RPJMN tahun 2020-2024 dan rencana strategis Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2020-2024 sasaran dan indikator

kinerja Kementerian Dalam penguatan kewirausahaan, UMKM dan koperasi antara lain:

1. Mengenai rasio kewirausahaan nasional dengan capaian sebesar 3,04% dari target 3,21%.
2. Kontribusi UMKM terhadap PDB yang sampai dengan saat ini masih dalam proses perhitungan dengan target 2023 adalah sebesar 64%.
3. Kontribusi koperasi terhadap PDB dengan capaian yang melebihi target yaitu 6,22% dari target 5,4%.

Adapun dalam pelaksanaan sebagai berikut:

Rasio kewirausahaan nasional dan pertumbuhan wirausaha secara target bisa tercapai melalui dukungan beberapa kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah, sebagaimana mandat Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional.

Kontribusi UMKM terhadap PDB sampai dengan saat ini masih dalam proses koordinasi dan konsolidasi data pada pusat statistik, BPS, mengenai proses perhitungannya.

Ketiga, kontribusi koperasi terhadap PDB Ini menggunakan data kontribusi PDB nasional sudah tercapai bahkan melebihi target, tetapi hingga saat ini Kementerian Koperasi masih melakukan perbaikan terhadap tata kelola, serta pengawasan koperasi yang juga melibatkan pemerintah daerah.

b. Capaian kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2023

Total kementerian, total anggaran sebesar 1,39 triliun dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2023 adalah sebesar 97,80% atau Rp 1,36 triliun, yang dialokasikan untuk perencanaan, untuk pelaksanaan program prioritas pada masing-masing satker dengan capaian program sebagai berikut:

1. Koperasi modern yang dikembangkan sebanyak 400 unit koperasi, yang terdiri atas 220 koperasi pangan dan 180 koperasi non-pangan. Pada tahun 2024, menargetkan 100 koperasi modern yang dikembangkan sehingga secara akumulatif hingga 2024 menjadi 500 koperasi modern yang dikembangkan.
2. Perluasan akses pembiayaan melalui skema KUR pada tahun 2023 sebesar 260,26 triliun yang disalurkan kepada 4,64 juta debitur.
3. Pembangunan rumah produksi bersama dalam rangka percepatan hilirisasi UMKM untuk meningkatkan kualitas produk UMKM dengan komoditas unggulan daerah yang telah terbangun di 8 lokasi pada tahun 2023.

4. Penciptaan wirausaha baru dengan target pada tahun 2024, 1 juta wirausaha. Per 31 Desember 2023 tercatat 821 ribu lebih wirausaha berhasil diciptakan melalui 320 kegiatan dari, dari 27 kementerian/lembaga.
5. Layanan fasilitas kemasan guna meningkatkan nilai tambah kualitas dan daya saing produk UMK yang saat ini sudah tersedia di 13 lokasi dan tahun 2024 kami mengalokasikan kembali untuk pengembangan layanan fasilitas kemasan dengan lokasi yang sudah ditetapkan sebanyak 10 lokasi dan saat ini sedang mengusulkan penambahan 10 lokasi lagi, sehingga total rencana pengembangan layanan fasilitas kemasan menjadi 20 lokasi.
6. Pengentasan kemiskinan ekstrem yang telah dilakukan di 48 lokasi prioritas pada tahun 2023 melalui fasilitasi akses pembiayaan, perluasan akses pasar, serta pendampingan dan pelatihan bagi koperasi dan usaha mikro.
7. Pendataan lengkap, hingga saat ini sudah terkumpul data *by name by address* sebanyak 13,4 juta data, yang selanjutnya bersama BPS kami akan melakukan integrasi dan integrasi data regsosek dan survei ekonomi data pertanian untuk memproyeksikan jumlah data UMKM secara keseluruhan.
8. Penyaluran dana bergulir per 3 Desember 2023 sebanyak Rp1,81 triliun yang berhasil disalurkan kepada 190 mitra koperasi.

c. Program kegiatan kolaborasi Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2023.

Tahun 2023 menjadi tahun kolaborasi Kementerian Koperasi dan UKM dengan beberapa K/L. Terdapat beberapa program kolaborasi meliputi:

Satu, Program Minyak Makan Merah dengan target 9 lokasi *piloting project* di antaranya: tiga koperasi *piloting* dengan skema kerja sama dengan PTPN, Koperasi Pujakesuma-Kabupaten Deli Serdang, Koperasi Sawit Unggul Sejahtera-Kabupaten Langkat, Koperasi Petani Indonesia Bukit Kijang-Kabupaten Asahan. Dan enam koperasi *piloting* mandiri KUD Sumber Makmur-Kabupaten Pelalawan, Koperasi Keling Kumang Agro-Kabupaten Sekadau, Koperasi Perkebunan Sawit Makmur-Kabupaten Tanah Laut, KUD Tani Subur-Kabupaten Kota Waringin Barat dan Koperasi Tiku V Jurong-Kabupaten Agam dan KUD Suka Makmur-Kabupaten Tanjab Barat.

Satu pabrik Minyak Makan Merah di Kabupaten Deli Serdang telah selesai dibangun dan diresmikan Bapak Presiden pada 14 Maret 2024. Memang ini ada keterlambatan tapi karena ini memang sedang dalam proses pembelajaran semuanya ya, tapi ke depan saya kira akan

lebih cepat. Sementara dua lokasi *piloting* lainnya skema kerja sama dengan PTP sudah di tahap *land clearing* atau pengerasan lahan.

Yang kedua, program solusi nelayan. Selain tujuh lokasi *piloting project*, terdapat empat lokasi terdaftar lainnya, untuk pembangunan terdapat tujuh lokasi *piloting* yang sudah selesai dibangun, stasiun bahan umum nelayan atau SPBUN, di antaranya 5 SPBUN telah beroperasi dan 2 SPBUN lainnya akan beroperasi pada bulan April 2024. Sementara dari 40 lokasi terdaftar, satu lokasi sudah beroperasi di Kabupaten Maros tahun 2023, 5 lokasi dalam proses pembangunan, Belitung, Konawe, Pematang, Brebes, dan Buol dan 34 lokasi terdaftar lainnya dalam proses pemberkasan atau perizinan.

Lalu yang ketiga, penyediaan 30% ruang usaha pada infrastruktur publik untuk UMKM di 6 lokasi *piloting project* yaitu:

1. Di terminal Luewi Panjang, Bandung,
2. Yogyakarta, Terminal International Airport,
3. Pelabuhan Merak,
4. Pelabuhan Bakauheni,
5. Rest Area KM 260B Banjaratma, dan
6. Terminal Banyuwangi Probolinggo.

Empat, alokasi 40% belanja pemerintah bagi produk UMKM. Berdasarkan data LKPP per 31 Desember 2023, koperasi dan UMK berhasil mendominasi produk di katalog LKPP. Dari total 6,2 juta produk, 74,8% merupakan produk koperasi dan UMK, serta dari total penyedia 255.592 sebanyak 80,6% penyedia merupakan Koperasi dan UMK.

d. Progres penyusunan RUU tentang perubahan ketiga atas RUU atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.

Kami berharap kiranya Pimpinan dan Anggota Komisi VI berkenan untuk segera melakukan pembahasan mengingat Bapak Presiden telah mengirimkan surat kepada Pimpinan DPR melalui Surat Presiden atau Surpres pada tanggal 19 September 2023, perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Demikian kami sampaikan evaluasi kinerja Kementerian Koperasi dan UKM tahun, Tahun Anggaran 2023, kiranya penjelasan yang kami harap sampaikan dapat diterima oleh para Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI yang kami cintai.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Om Shanti Shanti om,

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, SE., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Waaikumsalam,

Baik, terima kasih, Pak Menteri, atas pemaparannya.

Selanjutnya kita buka sesi pendalaman dari anggota, saya berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Bu Evita Nursanty.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Baik, terima kasih, Bapak Pimpinan.

Pak Menteri dan jajaran yang saya hormati,

Terima kasih atas paparan yang diberikan, kita evaluasi tapi singkat sekali ya, Pak, ya paparannya ya, Pak, ya, ini garis besar dari paparan yang ada. Saya mau ini *aja* ke halaman 3, Pak Menteri, ingin pendalaman di halaman 3.

Di sini Bapak menyampaikan ada penyaluran KUR per Desember 31, 260.26 T kepada 4,64 juta debitur. Ini mekanismenya seperti apa, Pak, penyaluran KUR ini, Pak, sistemnya bagaimana, siapa saja *sih* yang Bapak pilih yang mendapatkan, yang mendapat saluran KUR ini, Pak, ini yang saya ingin tahu penjelasan mengenai penyaluran KUR ini.

Kemudian, ada Bapak katakan, pengentasan kemiskinan ekstrem, intervensi kegiatan di 48 lokasi prioritas. Apa *sih* programnya, Pak? Karena dapil saya itu, itu apa namanya, kemiskinan ekstremnya, apalagi Grobogan, Pak, itu tinggi sekali, tapi saya *kok* enggak pernah dengar apa-apa, program mengenai apa pengentasan kemiskinan ekstrem di dapil saya, Pak. Apa bentuk program yang Bapak miliki di sini, Pak? Kenapa bisa enggak nyampai di dapil saya yang memang di Jawa Tengah itu tingkat kemiskinannya itu paling-paling tinggi, Pak?

Kemudian kalau pendataan ya ini saya sudah pendataan 13,4 juta yang Bapak katakan nanti akan sinkronisasi dengan apa BPS dan lain-lain, ya saya *ngelihat*-nya memang enggak pernah akan selesai kalau pendataan ini ya, Pak, ya, saya juga enggak tahu kapan mau selesainya pendataan ini. Kemudian saya juga enggak tahu 13,4 juta data ini dari mana, tolong dijelaskan saja, Pak, data ini dari mana nantinya.

Kemudian wirausaha baru 821.000. Apa peranan koperasi di wirausaha baru ini? Saya pengin tahu, Pak, peranan apa yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi terhadap wirausaha baru ini.

Kemudian penyaluran dana bergulir, Pak, 1,81 Triliun. Saya waktu itu pernah menanyakan ketika dirapat sebelumnya, apakah dana bergulir ini tidak bisa untuk koperasi Desa, Pak? Karena sekarang ini ketika kita turun-turun ke

daerah-daerah Pak, ke desa-desa itu mau *ngadain* koperasi di kabupaten, Pak, enggak *nyampe* ke desa itu Pak, para UMKM kita itu kan adanya di desa-desa, Pak. Kita mau menghidupkan kembali koperasi desa, tapi dananya dari mana, *kan gitu*, Pak Menteri. Apakah tidak mungkin apabila LPDB ya, Pak, ya ini ya? Itu juga, dulu *kan* ada ya koperasi unit desa ini, Pak, hidup. Apa kita tidak mungkin, Pak, kita hidupkan kembali koperasi desa ini, sehingga koperasi desa ini bisa juga berperan penting di dalam koperasi pertanian, Pak? Nah, sehingga koperasi ini juga bisa mempunyai peranan penting di dalam ketahanan pangan kita ke depan, Pak Menteri. Nah, ini juga tolong di ini apa namanya, dipikirkan juga, Pak.

Kemudian mengenai halaman 4, Pak Menteri. Ini ada Minyak Makan Merah apa segala makan, saya enggak tertarik deh, tapi solusi nelayan. Saya waktu itu pernah rapat sama Pak Menteri dan Pak Menteri pernah janjikan, "Iya nanti diadakan", di dapil saya, Pak, "Kita bareng-bareng ke dapil", kata Pak Menteri *nih*, sampai sekarang enggak pernah, Pak. Solusi nelayan yaitu *piloting project* apa, *project* Bapak mengenai SPBUN. Saya itu, Pati dan Rembang itu, itu daerah nelayan, Pak Menteri. Sudah selesai, Pak, bicaranya, Pak? Pati dan nelayan itu, eh Pati dan Rembang itu adalah nelayan, Pak, kabupaten saya, apakah tidak mungkin *pilot project* itu dilakukan di Pati dan Rembang, Pak Menteri? Itu pertanyaan saya.

Mengenai Undang-Undang Koperasi, saya *surprise* juga *nih*, Pak, rupanya sudah masuk ke DPR dari bulan September ya, Pak, ya. Kenapa dari kita ini juga belum ada pembahasan apa-apa mengenai koperasi ini. Tadi saya juga dari jauh sama Pak Sarmuji, Pak, "Kenapa, Pak, sudah di Pimpinan DPR, *emang* kita enggak bisa *follow up*, Pak, sudah dari bulan September, ini kan sudah lama sekali, sementara kita ingin buat *legacy* Komisi VI ini di periode kita ini, kita bisa menyelesaikan satu undang-undang". Dan yang memungkinkan undang-undang yang bisa kita selesaikan itu adalah Undang-Undang Koperasi, Pak Menteri. Jadi mungkin ya kita *nih*, Pak, Pak Pimpinan ya, yang bisa lebih proaktif lagi kepada Pimpinan DPR, agar ya tindak lanjut dari surat yang masuk bulan September ini seperti apa.

Di luar yang tadi, Pak Menteri, yang tadi Pak Menteri paparkan, saya hanya ingin mempertanyakan saja, Pak. Di awal tahun ini, itu *International Cooperative Alliance* dan *European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises* itu merilis *world cooperative monitor*, ada 300 koperasi besar dunia *list*-nya, Pak, mirisnya tidak satu pun ada dari Indonesia, kan begitu, Pak. Sementara kita, koperasi kita ini lebih dulu daripada India, tapi India *ranking* 1 dan 2 itu bisa mencapai, India di *list* 300 besar ini.

Nah, ada 166 koperasi dari Eropa, 94 koperasi dari Amerika, 40 koperasi dari Asia, negara-negara besar *nih*, Pak, yang koperasinya maju termasuk di 300 ini, miris kan, Pak, kalau kita enggak bisa *dapatin* satu saja nama koperasi dari Indonesia. Salahnya itu di mana Pak? *Kan* begitu yang kita inika. Dan umumnya koperasi-koperasi yang masuk ini, Pak, mereka itu punya spesifik ininya, Pak, *field*-nya, apakah itu dia di pertanian, apakah dia di ini, Pak. Mungkin kita mulai, Pak, *pilot project* kita juga, jadi koperasi kita juga diarahkan *gitu loh*, Pak Menteri. Bisa saya selesaikan enggak, Pak?

Jadi kita juga mulai, Pak, mungkin kita mengarahkan, jadi *pilot project* kita, kita mau ini *kan nih* koperasi untuk susu, *nih* koperasi, apalagi *nih* ada calon Presiden kita yang mau ini *kan* makan gratis, perlu susu, nah ini kita sudah kita arahkan lagi *nih*, untuk susu *nih* ada koperasinya, untuk ini *nih* ada koperasinya *kan* begitu, Pak, ya *kan*. Nah, ini semuanya mereka, kalau saya lihat yang mendapat, yang masuk di tiga, di 10 besar, 20 besar ini, mereka itu koperasi yang punya *specific field*-nya, Pak. Di pertanian, kemudian apa namanya di, di. *Kayak Ace Hardware, Ace Hardware* itu koperasi *loh*, Pak, jadi bisa sebesar itu, itu koperasi. Jadi itu yang saya harapkan sebenarnya koperasi kita itu juga bisa tumbuh seperti itu. Jadi enggak usahlah kita punya program yang besar-besar dan banyak-banyak. Kita konsentrasi *aja deh, focusing aja*, apa *nih*, kita mau *majuin* koperasi, koperasi apa, petani, koperasi nelayan, kita *masukin nih pilot project* kita sekarang UMKM, dengan adanya Covid-19 kemarin, banyak begitu banyak regulasi aturan pemerintah, yang benar-benar pro UMKM. *Kan* benar, Pak Menteri, banyak sekali kalau saya lihat. Tetapi mirisnya, ketika kita turun ke daerah, Pak Menteri, staf Bapak *kan* kalau saya sosialisasi ikut, Pak, bukan enggak ikut, jadi saya kalau *ngomong*, enggak *ngomong* asal-asalan *gitu*, Pak, ada pembicara dari Bapak *gitu loh*.

Ketika di kita *ngadain* forum begitu, Pak, ya, yang selalu menjadi ininya mereka, permodalan. Pertanyaan mereka pasti permodalan, UMKM itu, makanya saya katakan, kalau kita mau memajukan UMKM, harus ada permodalan. Permodalan itu siapa? Ya koperasi desa, yang bisa menunjang permodalan mereka *gitu*, Pak, kalau enggak, susah. Modal mereka *toh* enggak besar, paling 10 juta, 20 juta, *kan* begitu, Pak. Nah, jadi apa yang harus dipikirkan? Nah, di daerah saya itu *kan* sebenarnya yang, yang lebih banyak itu pertanian, Pak. Nah, apa *nih*, koperasinya mungkin yang diperbesar dengan koperasi pertaniannya, *kan* begitu, Pak, apa yang bisa koperasi ini nanti yang akan menampung gabah dari para petani, koperasi ini yang akan menampung ini, menampung ini. Jadi seperti di New Zealand lah, Pak, yang menampung susu dari peternak itu adalah koperasi, peternak itu enggak perlu jualan lagi, enggak perlu *mikirin marketing* lagi, mereka cuman peras-peras susu *aja*, ya *kan*, cuman menginikan susu *aja*, tapi pembelinya itu yang penampung susu itu adalah koperasi di New Zealand.

Nah, *pilot-pilot project* seperti inilah yang sebenarnya saya ingin dapatkan di Indonesia, Pak Menteri. Jadi enggak usah terlalu luas ya *pilot project*-nya dan juga UMKM ini. Tolonglah dikembangkan yang namanya sistem-sistem kemitraan, Pak. Jadi perusahaan-perusahaan besar yang melakukan kemitraan dengan koperasi, itu di, lebih di apa, dengan koperasi, eh dengan usaha-usaha UMKM ini lebih digalakkan lagi, Pak. Dan kalau perlu yang terbesar itu dievaluasi, diberi *reward* kepada mereka, Pak. Bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki kemitraan yang baik terhadap UMKM dikasihlah *reward* kepada mereka, dikasih *reward*, dikasih *award* kepada perusahaan-perusahaan itu sehingga lebih meningkatkan kemitraan daripada perusahaan-perusahaan besar terhadap UMKM-UMKM kita.

Saya rasa demikian, Bapak Pimpinan.

Terima kasih. Yang paling penting bagaimana kita segera membahas Undang-Undang Koperasi di Komisi VI.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, SE., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Terima kasih, Bu Evita.

Karena tadi disinggung pimpinan, jadi kita sudah mengirimkan surat, Bu Evita, ke Pimpinan, ini sebenarnya enggak lazim kita sampai mengirimkan surat. Bunyi suratnya juga tidak lazim sebenarnya, permintaan penugasan RUU Perkoperasian. Jadi saking kita pengen cepatnya undang-undang dibahas melalui surat Nomor B/840/PW.0211/2023, derajatnya kita sampaikan segera juga, Bu Evita. Jadi kita sudah mengirimkan surat, kita juga sudah rapat kerja waktu itu dalam tanda petik kita rekayasa, apa namanya, hasil kesimpulannya, supaya mencantumkan pembahasan RUU Koperasi dan kita sudah mengirimkan surat ke Pimpinan.

Mungkin Bu Evita bisa membantu kita untuk bisa melobi Pimpinan atau kalau Bu Evita, ah? Ini ada. Ya nanti kita kasih, kita kasih. Kalau Bu Evita enggak mempan, nanti kita minta Pak Mufti Anam, *kayaknya* lebih ampuh sering-sering bersama Mbak Puan.

Selanjutnya, silakan, Pak Mufti Anam.

F-PDIP (dr. H. MUFTI AIMAH NURUL ANAM):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Terima kasih, Pak calon Gubernur Jawa Timur terkuat, Pak Sarmuji. Luar biasa.

Asalamualaikum,

**Terima kasih banyak Pak Menteri dan;
Seluruh jajaran yang sudah hadir pada kesempatan hari ini,**

Pertama, Pak, tentu kami mengapresiasi dan senang sekali ketika mendengar berita soal peresmian Minyak Makan Merah, Pak, termasuk kami di DPR yang *concern* terhadap apa namanya, stabilitas kehadiran minyak goreng di tengah masyarakat, karena 2 tahun yang lalu, rakyat kita sempat teriak-teriak soal minyak goreng. Dan kita bersyukur sekarang sudah ada diversifikasinya, yaitu Minyak Makan Merah, walaupun kami belum tahu itu seperti apa, nanti mungkin teman-teman bisa dikirim sama Pak Menteri itu, barang macam apa itu, ya *kan*. Enggak, bercanda, Pak.

Kemudian yang kedua, Pak Menteri, kami lihat bahwa dari kemarin kami rapat, Pak Menteri, tidak ada satu kementerian pun yang secara *gentleman* memaparkan, mengingatkan kami soal Renstranya, Pak, tapi kami

apresiasi Bapak, terima kasih Bapak begitu *gentleman* memaparkan targetnya berapa dan kemudian capaiannya berapa dan target berikutnya berapa. Nah, menurut kami ini satu langkah yang positif yang nanti ke depan perlu ditiru oleh kementerian yang lain, termasuk Kementerian BUMN tadi pagi juga tidak memaparkan soal ini, begitu, padahal ini penting buat kami, Pak Menteri, sebagai tolak ukur dari kinerja kementerian yang dipimpin oleh Bapak-bapak sekalian *gitu*. Karena ibarat sekolah, Pak Menteri ini sudah hampir lulus begitu, Pak, karena sebentar lagi periode *kan* sudah hampir selesai. Nah, kalau Bapak lulus di periode ini berikutnya bapak bisa jadi Menteri Keuangan nanti, Pak, mungkin, ya *kan*.

Nah, cuman dalam hal ini, Pak, ada berapa yang kami tanyakan, soal tumbuhnya *startup*. Kami suka atas hal ini capaian ada 347 unit *startup* yang tumbuh, Pak, tapi di sisi lain ada anomali, kita lihat di masyarakat bahwa *startup* ini sekarang banyak bertumbuhan, Pak Menteri. Nah, kami sedikit agak ragu ini betul tidak data ini, maka kami mohon nanti kalau bisa di rapat berikutnya dipaparkan sebenarnya *startup* yang ada di data ini namanya apa saja, untuk kemudian kami cek apakah ini betul ada, atau mohon maaf, jangan-jangan ini sekedar angka saja *kan* begitu, ya *kan*.

Kemudian yang kedua, soal jumlah koperasi modern. Kami tadi tertarik oleh kawan kami Bu Evita. Jadi kami baru tahu bahwa, oh *Ace Hardware* itu koperasi, Pak, ya. Nah, itu yang kami bayangkan juga, Pak, maka kami lihat ada tumbuh 400 koperasi modern tapi jangankan di dapil saya, di Jawa Timur saja kami belum pernah dengar itu *gitu*, maka dari data ini mungkin akan jauh lebih bagus kalau nanti ke depan dilengkapi dengan 400 koperasi modern ini di mana saja, yang mungkin pada masa reses nanti kami pengen kunjungi salah satunya bersama teman-teman yang lain begitu, Pak.

Kemudian selanjutnya adalah di halaman 4, Pak Menteri. Di situ disampaikan oleh Pak Menteri tadi bahwa koperasi dan UMKM berhasil mendominasi produk di katalog LKPP. Sekali lagi, baru berhasil mendominasi produk di LKPP tapi kemudian barang itu dibeli oleh kementerian atau lembaga terkait yang membutuhkan produk itu. Maka pada kesempatan kali ini kami pengen tanyakan, sebenarnya dari total 80% dari apa namanya, data yang masuk di katalog LKPP tadi itu, kira-kira nanti mohon juga ditampilkan nilai belanja barang yang dibeli oleh kementerian dan lembaga itu sebenarnya ada berapa persennya? Jangan-jangan dari 80% hanya 0,5% ya *kan* percuma *aja*, Pak, *kalo* begitu. Karena kami sendiri banyak mengeluh kawan-kawan kami di daerah, termasuk kami tergabung di organisasi HIPMI, banyak sekali mereka selama ini hanya menjadi penonton, Pak. Mereka sudah daftar, begitu susahnya masuk LKPP, ternyata juga tidak ada yang klik itu barang.

Begitu juga dengan tadi, UMKM. Berkali-kali seminar, berkali-kali kegiatan pameran, tapi ya begitu-begitu saja, laku 1-2 di pameran tapi belum tentu ada yang *nge-klik*, belum tentu ada kementerian yang belanja di dalamnya begitu. Nah, maka harapan kami soal ini kami ingin tanyakan, apa langkah yang dilakukan oleh Pak Menteri Koperasi, Pak Teten, untuk kemudian bukan hanya sekedar terdata masuk LKPP tapi kemudian diklik dan dibeli oleh kementerian terkait begitu.

Nah, kemudian ini, Pak Menteri, satu hal yang mungkin sedikit *urgent* kami pengin tanyakan, Pak Menteri. Hari-hari ini bahkan semenjak musim kampanye, harga bahan pokok begitu *ningkat* sangat drastis, bahkan menyentuh harga 100.000 apa namanya, beras per 5 kilo, Pak Menteri. Dan walaupun sekarang sudah lumayan stabil, dari barang-barang pokok yang lain juga meningkat. Kalau masyarakat langsung sudah ada yang menyentuh namanya program yaitu Bansos begitu, yang menyasar masyarakat secara langsung, begitu juga ada pasar murah yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan yang bekerja sama dengan Bulog, walaupun kadang kami temukan tidak tepat sasaran karena yang antre di pasar murah itu juga orang-orang yang dibayar oleh tengkulak-tengkulak, bahkan beras-beras itu dioplos kemudian menjadi beras premium begitu, Pak Menteri. Nah, tapi dalam masa rakyat kita sedang menjerit, UMKM kita sedang teriak, karena sisi lain mereka apa namanya, mau beli beras, beli bahan baku, harganya mahal, tapi ketika mereka tidak jalan, tidak melakukan usahanya, mereka tidak bisa bekerja, kemudian mereka tidak bisa menghidupi keluarganya.

Nah, yang kami tanyakan di tempat ini, ke mana Kementerian Koperasi UMKM selama masa *paceklik* ini, Pak Menteri? Kami merasa sedih, di Komisi VI ini, mitra kerja kami Kementerian Koperasi UMKM, tapi kami tidak lihat kehadiran Kementerian Koperasi UMKM ketika para UMKM-UMKM kita, para pedagang-pedagang pentol, pedagang cilok, pemilik warung-warung itu, Pak Menteri, yang mereka menjerit terhadap harga-harga bahan pokok, yang mereka kemudian terpaksa tetap menjualan, karena kalau tidak itu mereka tidak punya pekerjaan lain, dan ini tidak ada perlindungan dari Kementerian Koperasi UMKM. Nah, maka harapan kami, Pak Menteri, pada kesempatan ini kami ingin minta penjelasan, apa *sih* sebenarnya yang sudah dilakukan Kementerian Koperasi selama masa-masa sulit ini untuk bagaimana memberikan perlindungan kepada mereka.

Kemudian berapa tahun yang terakhir, Pak Menteri menggaungkan soal agar *marketplace* agar barang-barang di bawah 100 US Dollar atau 1,5 juta tidak bisa masuk ke dalam negeri kita dan akhirnya disambut oleh Kementerian Perdagangan, dengan keluarnya Permendag Nomor 19, 1988 Tahun 2023, kami *ngapresiasi* atas hal itu. Tapi pertanyaan kami hari ini, apakah dengan adanya Permendag itu kemudian UMKM kita sudah terlindung ya, Pak Menteri? Karena pada kenyataannya, hari ini kalau Pak Menteri buka melalui yang aplikasi yang *orange-orange* itu, Bapak masih bisa beli, misalnya daster saja masih bisa beli, Pak, dari luar negeri, Pak. Jadi apa namanya, dompet *aja*, apa yang dipakai ibu-ibu itu, tas saja, mereka masih bisa beli 1-2 biji dari luar negeri. Jadi artinya sepertinya Permendag ini hanya sekedar Permendag, lalu langkah apa yang Pak Menteri akan lakukan untuk memproteksi para UMKM kita ini agar bisa terus tumbuh? Karena *njenengan* tahu di daerah kami di Jawa Timur ada namanya daerah Tanggulangin, sekarang toko-tokonya sudah hampir gulung tikar karena mereka kalah saing dengan produk-produk dari luar negeri yang itu jauh lebih kompetitif secara harga, begitu, Pak Menteri.

Itu *aja* dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, SE., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Walaikumsalam,

Terima kasih, Pak Mufti Anam.

Selanjutnya, Pak Husni, sekaligus kami perkenalkan, Pak Menteri, ini Anggota baru di Komisi VI, sebelumnya di Komisi VIII.

Silakan, Pak Husni, memperkenalkan lebih jauh juga boleh.

F-P.GERINDRA (H. M. HUSNI, S.E., M.M.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**Yang saya hormati Pimpinan Komisi VI, dan seluruh jajarannya,
Yang saya hormati Menteri Koperasi UKM, dan seluruh jajarannya,**

Perkenalkan saya H. M. Husni, S.E., M.M., Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Dapil Sumut I A-62.

Sedikit yang ingin saya tanyakan, Pak Menteri. Koperasi itu adalah sokoguru perekonomian daripada republik kita. Pada tahun 1998 waktu terjadi apa, gejolak perekonomian yang perusahaan-perusahaan besar pada jatuh dan tumbang, UMK dan UMKM itu saat itu bertahan. Mestinya kita juga menjadi sebuah landasan, landasan untuk bergerak daripada usaha kecil menengah. Apa yang menjadi landasan, makanya mereka itu bisa bertahan, dan juga di sini tentunya sedikit, Pak Menteri, Koperasi Unit Desa yang dulunya luar biasa tumbuh dan berkembang di seluruh Republik Indonesia yang amat sangat membantu petani, nelayan, untuk mendapatkan pupuk, bibit, dan juga menjual hasil produk petani tersebut. Tiba-tiba hari ini seperti hilang, mestinya kita bisa menghitung berapa *lost*, berapa kerugian, misalnya dari keberadaan KUD itu tersebut.

Hari ini begitu marak, begitu banyaknya koperasi-koperasi simpan pinjam yang tumbuh kembang. Saya rasa ya yang banyak juga akhirnya menjerat masyarakat sebagai nasabahnya. Tanpa ada pengawasan dan pengawalan, kita bisa ketahui tiba-tiba mereka melakukan apa, simpan dengan bunga 10 sampai 12%, di atas yang ditetapkan oleh OJK, yang akhirnya masyarakat yang berpikir lebih bagus dia menyimpan uangnya di koperasi simpan pinjam tersebut. Namun tidak ada satu, tidak ada satu apa, departemen pun yang bisa menjamin bahwa waktu itu aman ya. Dan kenapa kita selaku dari Kementerian Koperasi, bila mereka sudah melakukan jalan-

jalan yang menyimpang dan salah tidak langsung ditutup, tapi ditunggu sampai turun korban-korban yang berjatuhan.

Kemudian juga sedikit, Pak Menteri, saya mantan Komisi VIII, yang banyak, yang bermitra dengan Kementerian Sosial. Di Kementerian Sosial, ada yang namanya Pena, pahlawan ekonomi nasional. Dia hampir mirip-mirip dengan kredit usaha rakyat. Ya memang nilainya yang berbeda. Kalau dari KUR, itu pembiayaannya sampai 50 juta, kalau di Pena dikasih 5 juta tapi tak, tak, apa, uangnya itu tidak perlu dikembalikan, untuk membantu menggerakkan ekonomi rakyat.

Jadi di sini waktu pada masa, ini saya kembali *feedback* ya, Pak Menteri, dulu waktu ada KUD, mereka yang menerima bantuan seolah-olah, ini seolah-olah dalam, dalam "mendapat bantuan pembiayaan dari koperasi" seolah-olah tak perlu bayar lagi. Tentunya hal seperti ini masih boleh dihidupkan karena ini cuma masalah kesalahan daripada manajemen saja.

Kemudian di halaman 4 ini, Pak Menteri, saya, apa yang disampaikan oleh sahabat saya tadi tentang UMK berhasil mendominasi produk di katalog LKPP sampai 80,6% ya. Cuma yang ingin saya tanyakan, Pak Menteri, mereka cuma hadir saja sebagai untuk pemenuhan dari katalog atau mereka jadi seorang pemain atau menjadi seorang pebisnis yang unggul atau untuk apa, mereka mempunyai daya saing ya, ya, daya saing dalam melakukan pembelanjaan pemerintah. Jadi kita di sini harus benar-benar mengetahui, karena koperasi ya, seperti yang Pak Menteri jabarkan di halaman 4 juga tentang Minyak Makan Merah. Ya ini memang bagus ya, Pak, Pak Menteri, ini diserahkan kepada koperasi-koperasi yang kumpulan masyarakat itu bisa mendapatkan keuntungan di dalam penjualan Minyak Makan Merah. Minyak Makan Merah ini setahu saya dia tidak, tidak, pengelolaannya tidak sampai empat sampai lima kali, mungkin 1-2 kali dia proses daripada apa, pabrikannya.

Namun Pak Menteri boleh, boleh cek ya, dulu pernah Menteri Kementerian Koperasi melakukan hal ini juga tentang masalah penyaluran minyak goreng, tapi akhirnya saya lupa itu tahun berapa ya, mungkin 20 tahun yang lalu, akhirnya ini gagal total ini, Pak Menteri, ini gagal total. Sebetulnya yang bikin gagal ini bukan koperasinya tapi adalah penempatan orang-orang yang diberikan fasilitas dalam melaksanakan, pelaksanaan daripada apa, pemasaran dari minyak goreng itu sendiri.

Itu saja, Pak Menteri, masukan dari saya, salam kenal dari saya sekali lagi. Saya akhiri.

*Wabillahi taufik wal hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, SE., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Selanjutnya kami persilakan, Pak Harris Turino.

F-PDIP (Dr. Ir. HARRIS TURINO, S.H., M.Si., M.M.):

Baik, terima kasih, Pimpinan.

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi VI,
Yang terhormat Pak Menteri Koperasi dan UKM, Pak Teten,
Yang terhormat Pak Sesmen yang satu kampung dengan saya, beserta
seluruh jajaran Kementeriannya,**

Harus kita apresiasi Pak bahwa pencapaian Bapak di RPJMN dan Renstra, beberapa telah melampaui target, ya. Kalau kita telisik lebih lanjut, Pak, apa yang Bapak paparkan, ini angka-angkanya adalah angka-angka kuantitatif, ya. Saya mau menyebut tiga angka yang tidak Bapak sebutkan, yaitu pertumbuhan wirausaha 2,74%, pertumbuhan *startup* 347 unit dan proporsi UMKM yang memiliki akses terhadap lembaga keuangan 30,62% ya. Alangkah baiknya mungkin Pak Menteri ke depannya juga bisa dilengkapi dengan data-data yang sifatnya kualitatif. Satu contoh mengenai *startup*. Berapa banyak sih *startup* yang berhasil tumbuh, dari tahap *early stage*, *later stage* sampai menjadi *a real company*. Rasanya ini akan sangat berguna, Pak.

Studi yang dilakukan oleh Shikhar Ghosh di di *Harvard Business School* mengatakan bahwa, 75% dari *startup* akan tumbang. Definisi daripada tumbang adalah *liquidating all asset* dengan investor mengalami kerugian minimal 30 sampai 40% atau tidak mencapai *projected return on investment*, ini 90%-nya. Nah, yang mau saya sampaikan adalah, Pak, membikin *startup* itu perkara yang sangat mudah, tetapi mengembangkan *startup* ini jauh lebih susah, sehingga rasanya peranan dari Kementerian Koperasi dan UKM di sini akan lebih mulia jika misalkan juga membantu *startup* yang sudah tumbuh untuk bisa dikembangkan, apalagi kalau angka 300-an, 347, untuk sekelas Indonesia, ya angkanya masih sangat kecil.

Kita ambil spekulasi saja, Pak, seandainya, seandainya kita kemudian menggunakan *venture* kapitalis misalkan, untuk meneliti, kita mau dirikan 1.000 *startup* dan masing-masing *startup* dikasih duit 100 juta, itu angkanya cuma 100 miliar. Mereka seleksi 1.000 *startup*, didanai oleh pemerintah. Dan seandainya 40%-nya rontok, berarti kita punya 600 *startup* yang pemerintah *chipping in the money* sebesar 100 juta. Tentu angka ini lebih gede dari hanya 347 *startup*. Dan kalau kemudian *startup* ini berkembang lebih lanjut, ya tentu silakan didanai oleh *venture* kapitalis. Rasanya langkah-langkah ini akan jauh lebih bagus peranan ini ke depannya untuk dilaksanakan.

Angka-angka yang lain adalah tadi Bapak *ngomong* proporsi UKM yang punya akses ke kredit di lembaga keuangan. Kalau dilampiri dengan data, UKM-UKM ini berapa persen sih NPL-nya, berapa persen UKM ini yang mampu melunasi utang-utangnya tepat waktu, ini akan jauh lebih bagus, angka kualitatifnya, Bapak sudah lakukan, yaitu bertransformasi dari informal ke formal, tetapi ke depannya mungkin akan lebih bagus lagi kalau juga data-datanya lebih komplit.

Mengenai koperasi, angka yang Bapak sampaikan juga kuantitatif, kualitatifnya bermasalah. Salah satunya adalah koperasi simpan pinjam. Akan lebih bagus seandainya Kementerian Koperasi juga memiliki alat monitor atau deteksi dini terhadap koperasi-koperasi yang tiba-tiba terjadi satu kenaikan aset yang luar biasa. Ini sudah *early warning*, berarti ada *something wrong* di sana, walaupun nantinya di RUU Perkoperasian akan beralih. Tapi paling tidak, di masa sekarang ini Kementerian Koperasi harus ambil peran. Sejauh mana penyelesaian hukum, rasanya perlu disampaikan kepada kami di Komisi VI, terhadap koperasi-koperasi bermasalah. Seperti saya selalu sampaikan di rapat-rapat dengan Pak Teten tentang Koperasi Sejahtera Bersama, KSB ya. Sejauh mana *sih, wong* sudah inkrah *kok*. Karena setiap pulang saya di tanyain orang tentang hal yang sama, rasanya perlu penjelasan lebih lanjut, Pak.

Dan yang terakhir, Pak Teten, ini kontribusi Koperasi dan UKM terhadap pajak, ini juga angkanya rendah sekali, walaupun pemerintah sudah melakukan banyak sekali dukungan, mempermudah proses pelaporan dan perhitungan pajak *final*, tetap kontribusinya hanya 3% dari UKM yang melaporkan dan membayar pajak. Rasanya ini juga perlu dilakukan pembinaan oleh Pak Menteri.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, SE., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Walaikumsalam,

Terima kasih, Pak Harris.

Selanjutnya, Pak Deddy Sitorus.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Makasih, Pimpinan.

Selamat sore, Pak Menteri dan jajaran,

Sudah lamanya enggak ketemu Pak Teten.

Mas, saya tertarik yang pertama soal SPBUN. Ini sebenarnya saya tertarik karena stafnya Pak Menteri ini datang ke dapil saya, gara-gara itu saya terpikir soal SPBUN ini, tapi ini prosesnya sudah sangat lama, sekarang katanya berkasnya ada di BPH Migas ya, Pak? Saya enggak tahu ada urusannya apa ke BPH Migas, kalau bisa tolong dibantu, Pak, di Kota Tarakan, karena di apa namanya, di Tarakan dan Nunukan itu, rumput laut luar biasa, Pak. Jadi Kaltara itu penghasil rumput laut ketiga terbesar di

Indonesia. Kalau saya enggak salah itu, tahun kemarin sekitar 600.000 ton lebih ya, produksi Kalimantan Utara.

Nah, dalam kaitan itu, saya ingin bertanya apa yang kita, Kementerian Koperasi, bisa lakukan, Pak, untuk rumput laut, apa, pembudidayaan rumput laut ini, Pak. Kemarin saya terus-terang saya minta tolong sama Ibu Mensos itu untuk pengadaan pengering rumput laut, Pak. Sekarang harga rumput laut itu terjun bebas, Pak, jadi hanya Rp9.000,00 per kilogram. Padahal mungkin 90% nelayan di di dua wilayah terbesar di Kalimantan Utara itu sudah beralih dari nelayan tangkap jadi budidaya rumput laut, Pak. Dan rumput laut Kalimantan Utara itu salah satu yang terbaik di Indonesia, saya kira.

Nah, kalau kita, Kementerian Koperasi, bisa bantu, Pak, para pengusaha apa, pembudidaya rumput laut ini, saya kira kami menunggu ya, Pak, ya, apa yang bisa kita lakukan untuk mereka. Dalam pikiran saya, kalau kita bisa membantu mereka, tadi itu soal apa namanya, BBM, ya satu. Yang kedua tentu soal *processing*, Pak, karena kalau berharap hanya dengan pengeringan konvensional itu bisa sehari-hari, Pak, kalau mendung malah bisa bermasalah sehingga kalau ada pengering rumput laut, saya dengar ada yang bisa 2 ton per jam atau *gimana*, itu saya kira itu akan sangat membantu. Yang pertama, yang kedua juga menaikkan harga jualnya, Pak, ya, itu penting saya kira.

Dan yang ketiga, Pak, kalau bisa ini diorganisir sehingga Kalimantan Utara bisa langsung ekspor, Pak. Tidak lagi melalui Surabaya, melalui Makassar, ya, sehingga mereka itu sangat menderita, Pak, puluhan ribu orang sangat tergantung pada rumput laut ini, Pak. Jadi saya menunggu dari Kementerian Koperasi dan UMKM, Pak, bagaimana kita bisa menjaga, apa namanya, para pembudidaya rumput laut ini di Kalimantan Utara. Kalau bisa, Kang Teten saya *temanin* main-main ke Kaltara untuk lihat, senang sekali, saya sudah bawa Menteri KKP ke sana juga, ya, ada rencana bikin pabrik pengolahan rumput laut di sana tapi saya belum tahu sampai mana, mungkin bisa berkomunikasi ini dengan Mas Trenggono ini, bagaimana bisa sinergi.

Lalu yang kedua, kalau Pak Menteri ingat, kita pernah *ngomong* soal pabrik Minyak Goreng Merah untuk Kaltara, *kan* begitu *nih*, saya pernah ingatkan juga katanya nanti kalau *pilot project* yang tiga di Sumut sudah, Kaltara akan diupayakan dapat satu. Dulu saya juga pernah perjuangkan itu waktu belum diputuskan masih di Kementerian Perindustrian *tuh* dengan Pak Dirjen waktu itu ya. Kenapa? Karena saya terus-terang malu, kenapa kita penghasil CPO terbesar gitu ya, tapi minyak goreng, Pak, di perbatasan di Kaltara itu, dari Malaysia, Pak. Dan harganya lebih murah dari kita punya. Jadi waktu krisis minyak goreng di sana, hampir tidak terlalu terasa di daerah Kabupaten Nunukan segala macam, karena masuknya dari Malaysia, itu yang pertama.

Yang kedua, ketika terjadi pembatasan itu petani rugi total, Pak, karena apa? Tidak bisa jual sawitnya, PKS membatasi pembelian, padahal mereka sudah sangat terbebani. Jadi kalau ada benar-benar bisa kita realisasikan pabrik Minyak Goreng Merah di Kalimantan Utara itu akan sangat membantu

memastikan kita, apa namanya, kita punya harga dirilah sebagai bangsa, masa iya minyak gorengnya dari Malaysia *gitu*.

Saya tahun lalu itu, Pak, ketika krisis, mau bikin sembako ke masyarakat, *nyari* minyak goreng Indonesia, enggak ketemu. Saya sebagai Anggota DPR RI *kan* enggak mungkin pakai minyak goreng dari Malaysia yang sudah jelas-jelas seludupan, nah itu sangat bermasalah. Akhirnya saya minta RNI dulu untuk membantu itu, itu soal Minyak Goreng Merah, mudah-mudahan bisa bantu kita, Mas Menteri, untuk di Kaltara bisa dibangun itu, karena apa? Dia penyangga ibu kota negara yang baru, juga beranda depan negara kita.

Lalu yang ketiga, saya berharap juga supaya pembenahan koperasi apakah itu sawit atau multi pihak atau apa pun di Kaltara ini benar-benar ada yang *ngurus*, karena kalau di daerah *kan* koperasi itu digabung dengan yang lain-lain, perdagangan, perindustrian atau yang lain, jadi sama sekali tidak mendapat perhatian yang layak. Saya kira kalau di sini saya lihat ada koperasi *piloting*, kenapa enggak di Kaltara, Mas? Ya kita buat. Saya kira Kaltara sekarang ini dan ke depan akan menjadi rujukan pertumbuhan ekonomi baru, dengan apa? Dengan ditetapkannya, sudah diresmikannya itu yang namanya proyek strategis nasional kawasan industri hijau terbesar di dunia oleh Pak Jokowi. Kalau kita bisa membantu Kalimantan Utara supaya mereka bisa memproduksi sebagai UMKM, sebagai koperasi, maka nanti orang Kaltara enggak jadi penonton, Pak. Saya takutnya nanti untuk telur ayam saja datangnya dari Jawa. Sekarang kebutuhan ayam saja di, ini masih pematangan lahan, ya daging, itu bisa 5 ton, 50 ton per bulan, Pak, belinya dari Malaysia, daging beku. Nah, ini *kan* kesempatan sebenarnya yang menurut saya kalau kita dorong sehingga manfaatnya ada industri investasi besar itu dirasakan oleh rakyat setempat, Pak, tidak hanya oleh orang-orang kaya tapi masyarakat biasa. Jadi kalau mau ada pengorganisasian rakyat untuk koperasi, saya akan dengan senang hati, Pak Menteri, untuk bantu dorong proses itu.

Terima kasih, Pak Menteri. Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, SE., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Terima kasih, Pak Deddy Sitorus.

Selanjutnya, Profesor Darmadi.

F-PDIP (Prof (Assc) Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A.):

Terima kasih, Pimpinan.

Pak Menteri dan jajaran yang saya hormati,

Ada beberapa pertanyaan, yang pertama ini kan di dapil saya sudah beberapa kali *pingin* mendapatkan dana bergulir, kredit. Saya lihat di sini kan

1,81 T. Jadi rata-rata, Pak Menteri, ini kesulitan memenuhi persyaratan, beberapa kali saya bilang, "Ke sana, tolong hubungi si A, si B *gitu*", tapi tetap saja memang gagal ya, jadi gagalnya banyak persoalan *gitu*. Ini ada perubahan enggak ada persyaratan tahun-tahun ini, *gitu*, sehingga kita bisa dapat informasi. Karena percuma juga kalau kita kemudian ada yang mau kemudian terhambat berbagai persoalan *gitu*, jadi ya banyak persoalan. Misalnya saja, ini *kan* kalau enggak salah ini sistemnya cicilan ya, Pak, ya, nah mereka pengen KMK *gitu*, Kredit Modal Kerja. Nah ini bisa di, d adopsi enggak ini keinginan mereka, begitu. Kemudian misalnya pencatatannya biasanya bermasalah, pencatatan, pembukaan akuntansinya bermasalah. Nah, ini poin-poin yang sering mereka hadapi. Ya maklum *kan* koperasi, nyatatnya sembarangan, bahkan penjualan hanya pakai kertas, sudah, *kan* begitu *kan*, Pak Teten, ya. Kalau zaman dulu kalau ke bank pakai kertas *aja* bisa minjam *loh*, Pak, kalau sekarang *kan* sudah enggak bisa. Sepuluh tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu kalau saya ke Pasar Senen itu, saya tanya ke bank itu, di situ ada bank Buana, "Ini bisa, bisa pinjam *gimana*", hanya secarik kertas saja bisa pinjam, dulu. Nah, tapi sekarang *kan* tentu sudah enggak bisa. Tetapi ini koperasi ini, saya pikir pencatatan mereka *kan* tidak sempurna ya, apalagi pakai jurnal-jurnal segala *kan* susah juga, Pak. Jadi ada enggak perubahan untuk adopsi mereka, koperasi-koperasi yang baru berjalan satu-dua tahun ini, yang baru bertumbuh ini *kan* pengen minjam *nih* sebetulnya ya. Beberapa saya sudah pernah kirim ke Kementerian Koperasi dan saya tanya, "Gimana?", "Gagal, Pak, enggak bisa, Pak", begitu. Jadi banyak sebab, nah mohon nanti diperjelas.

Yang kedua adalah soal minyak goreng murah, eh minyak goreng merah, jadi di sini *kan* minyak makan merah ini. Nah, ini *kan* ada program *nih* saya lihat di Sumut, Deli Serdang, ini kebanyakan di Sumut ya, di Sumut *gitu*, *pilot project* 6 koperasi di sana. Nah, setelah *dilaunching* ini, *kan* sudah sampai ke konsumen *kan*, betul ya Pak Menteri, itu ada enggak riset mengenai *post buying behaviour*? Setelah itu sebetulnya perilakunya bagaimana dalam *acceptance* ya, dalam *acceptance rate* mereka *gitu*? Jadi tingkat penerimaan mereka bagaimana, misalnya kesukaan mereka bagaimana, keyakinan mereka bagaimana, *knowledge* mereka bagaimana, dan apakah ada *repeat* untuk membeli itu? Jadi ini *kan* harus diukur, *post buying behaviour* ini, perilaku setelah dia membeli ini, apa *behaviour*-nya. Nah, ada enggak riset mengenai itu, dijalankan enggak *gitu*? Karena *kan* kita ini masih awam *nih* masyarakat *nih* mengenai minyak makan merah. Ini walaupun sudah di *ondorse* oleh Pak Presiden, tapi banyak yang belum mengerti. Kalau saya tanya ke masyarakat ya banyak enggak tahu apa itu, kalau di Jakarta. Saya enggak tau kalau di Jawa Tengah Tempatnya Pak Adi atau di Kaltara. Tapi kalau tempat saya di Jakarta, minyak makan merah itu apa? Mungkin lihat warna merah *aja* sudah takut, oh langsung nyoblos kalau lihat merah, tapi sekarang Pak Teten banyak yang sudah tidak nyoblos merah, berkurang, karena lari ke kuning nampaknya. Kuning ya, namanya minyak kuning, memang, jadi itu.

Jadi *post buying behaviour*-nya ini mesti dilakukan riset, Pak, ya supaya kita tahu sebetulnya, nanti sudah dicoba dengan *pilot project* di jalan

dikasih dana, enggak tahunya *post buying behaviour*-nya enggak bagus ya, nah ini kita butuh data.

Mengenai pengentasan kemiskinan ekstrem, intervensi kegiatan di 48 lokasi prioritas, saya enggak ngerti ini, apa intervensi ini, ya. Kalau pengentasan kemiskinan ekstrem itu kan yang disentuh *kan* desil-desil satu-dua, kemiskinan ekstrem *tuh*, desil 1 sampai 10, desil 1-2 yang penghasilan itu miskin ekstrem, itu intervensinya *gimana* ya? Intervensi ini maksudnya apa *gitu* ya. Empat puluh delapan lokasi prioritas ini apa dan apa dampaknya *gitu kan*. Jadi artinya desil berapa yang disentuh ini, desil 1-2 atau 5-6 atau 9-10 *gitu*, ya kan. Apa betul menyentuh desil 1-2 *gitu*? Berarti data yang dipakai data dari P3KE, ya, bukan data DTKS *kan*, betul enggak? Jadi nanti coba kasih tahu, Pak Menteri, ini kira-kira bagaimana.

Terus soal menghitung wirausaha baru, 821.556, angkanya ganjil-ganjil lagi, ini beneran enggak *nih*, Pak, cara *ngitungnya* bagaimana, ya kan? Wirausaha baru itu seperti apa, *ngitung* dia masuk kelompok wirausaha baru itu bagaimana, ya. Ya ini teknisnya bagaimana? Seperti 65,7 juta itu *kan* membingungkan *kan*, Pak Menteri? Usaha UMKM 5, 65,7 juta, apa ada UMKM sebanyak itu, *gitu kan*, jadi pengertian itu berbeda ternyata *kan*, jadi itu. Nah, ini yang nanti mohon dijelaskan, begitu.

Terus yang ke, ke selanjutnya adalah penurunan yang 65,7 juta ini kan banyak di mikro, selama ini langkah apa yang sudah dilakukan supaya menggeser dari yang mikro ke kecil ini? Karena berkali-kali ini kan program yang G2 ini agak susah ini, yang mikro ini urusnya urusannya, Pak Teten, susah banget ini, orangnya juga enggak gampang diurus, ya *kan*, dan sebagainya. Jadi ini program apa G2 yang sekarang mau dijalankan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM, nah, ini mohon informasinya, begitu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, SE., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Terima kasih, Prof.

Selanjutnya, Pak Adi, kami persilakan.

F-PDIP (ADISATRYA SURYO SULISTO):

Baik, terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang kami hormati Pak Menteri Koperasi dan UKM beserta jajaran,

Pertama-tama, setelah membaca paparan Bapak ini, apresiasi atas capaian realisasi anggaran Kemenkop dan UKM di tahun 2023 yang

mencapai 97,8%, kami berharap agar evaluasi pelaksanaan anggaran 2023 dapat menjadi landasan dalam meningkatkan kinerja tahun 2024.

Ada beberapa hal yang ingin kami pertanyakan dan dalami, yang pertama, terkait dengan pelambatan penyaluran KUR tahun 2023, bagaimana hasil evaluasi dan pemantauan penyaluran KUR dari Kementerian Koperasi dan UKM? Apa permasalahan atau penyebabnya? Kemudian apakah sudah ada hasil kajian bagaimana dampak ekonomi dari penyaluran KUR tersebut kepada UMKM. Selanjutnya untuk tahun 2024 ini, apakah penyaluran KUR masih akan diprioritaskan untuk UMKM sektor produksi, seperti pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan?

Yang kedua, terkait dengan data tunggal koperasi dan UMKM. Dalam berbagai kesempatan, kami selalu mendukung adanya basis data tunggal ini dan kami berharap dapat memberikan informasi yang akurat dan faktual terkait dengan UMKM. Nah, pertanyaannya, dari hasil pendataan lengkap yang sudah dilakukan, kami ingin mengetahui sebarannya, Pak, ya, kriteria usahanya bagaimana pengumpulan data itu dilakukan, apa kendalanya, kemudian sejauh mana *output* yang dihasilkan berupa *by name*, *by address* tersebut nantinya bisa diakses oleh publik, apakah informasi usaha juga ada yang dikecualikan? Juga terkait dengan produk Koperasi dan UKM yang mendominasi di e-katalog LKPP, tentu bagus, semakin banyak produk-produk UKM yang ada di LKPP, tetapi mungkin harus juga kita teliti dan lihat dampaknya terhadap usaha dari UMKM yang sudah terdaftar di e-katalog LKPP. Bagaimana peningkatan penjualannya dan sebagainya, ya, tentu tujuan dari apa, dimasukkannya banyak produk UMKM di situ tentu untuk membantu meningkatkan penjualan mereka, nah, tapi bagaimana realisasinya, apakah ada pantauan juga dari Kementerian Koperasi dan UKM?

Nah, di sini terkait capaian kinerja, Bapak menyampaikan wirausaha baru, tadi juga sudah disinggung oleh Pak Darmadi ini, 821.556. Ya kita ketahui dari, secara statistik, dari sekian banyak wirausaha baru, yang bisa berlanjut setelah jalan mungkin setahun apa 2 tahun itu persentasenya sangat kecil, ya, karena banyak, namanya usaha baru kan pasti banyak yang *failed* juga, nah di sinilah yang menurut saya Kementerian Koperasi dan UKM juga harus melihat tingkat kesuksesan dari wirausaha-wirausaha baru di Indonesia secara umum seperti apa? Apa yang menjadi faktor utama dari kegagalan wirausaha baru? Apakah itu di pendanaan, di penjualan, dan lain sebagainya, sehingga dalam membuat program untuk membantu UKM itu lebih tepat dan lebih terarah dari sisi Kementerian Koperasi dan UKM.

Saya juga ingin menyinggung soal program atau kegiatan kolaborasi dari Kementerian Koperasi dan UKM, ini yang pertama minyak makan merah tadi juga sudah disinggung, ada 9 lokasi yang menjadi *pilot project* untuk minyak makan merah. Nah, pertanyaan saya ini sebenarnya *planning* ke depannya seperti apa, Pak? Namanya *pilot*, tentu kita juga tertarik nantinya kalau sudah selesai ini *pilot project*-nya, apa hasilnya, dan apa yang menjadi keputusan apakah diteruskan secara *rollout*, secara masif, di seluruh nusantara, atau bagaimana, atau hanya ternyata minyak merah, minyak

makan merah ini hanya bisa diterima oleh konsumen di beberapa wilayah saja, mungkin *by* provinsi atau saya tidak tahu. Nah, ini hal-hal seperti ini yang juga menarik untuk kita, kami ketahui sehingga bisa tahu juga *planning* dari *pilot project* ini terkait minyak makan merah akan bagaimana ke depannya.

Terkait Solusi Nelayan SPBUN, kebetulan dapil saya Cilacap, waktu itu juga dengan Pak Teten, kita resmikan dengan Pak Erick juga pada waktu itu bersama dengan Pertamina, salah satu SPBUN yang apa, diadakan di Cilacap. Ini responsnya sangat positif, Pak Teten, terima kasih tentunya, namun ketersediaan BBM-nya justru itu *up and down* ya, kadang ada, bagus, nelayan semua bisa melaut, tapi juga kalau terbatas banyak yang tidak bisa melaut. Nah, tentu karena sesama pemerintah, Pertamina di bawah Kementerian BUMN, mungkin juga Kementerian Koperasi dan UKM bisa memfasilitasi atau bisa bantu memastikan ketersediaan BBM di SPBUN yang memang diadakan untuk kepentingan nelayan ya. Sayang saja infrastrukturnya sudah dibuat, diadakan, tetapi nelayan juga tidak bisa melaut secara maksimal karena ketersediaan BBM yang *up and down* ya. Saya tidak bilang selalu kurang, tapi sering kali itu ketersediaannya kurang dari keperluan di lokasi tersebut.

Baik, mungkin itu saja, Pimpinan, dari kami, terima kasih sekali lagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, SE., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Walaikumsalam,

Terima kasih, Pak Adi.

Masih ada? Enggak? Baik, dari anggota sudah lengkap pendalamannya menanggapi paparan Pak Menteri.

Selanjutnya, silakan Pak Menteri memberi tanggapan balik atas seluruh pertanyaan dan pendalaman Anggota.

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (Drs. TETEN MASDUKI):

Baik, terima kasih.

**Bapak-Ibu sekalian,
Pimpinan Anggota,
dan Anggota Komisi VI,**

Dari berbagai pertanyaan itu saya juga mendapatkan cukup banyak masukan untuk perbaikan program, capaian program ke depan, itu juga saya ucapkan terima kasih.

Saya mungkin yang ingin saya ini mengenai KUR dulu ya. Memang harus diakui, KUR itu harus kita evaluasi. Dan ini sudah kita sampaikan. Karena masih sulit UMKM itu untuk mengakses KUR meskipun secara regulasi, KUR itu sampai 100 juta itu tanpa agunan, tapi praktiknya bank pelaksana penyalur KUR itu tetap di tingkat cabang itu tetap mempersyaratkan agunan. Karena itu, kami sedang melakukan kajian dan ini sebentar lagi kita akan bawa di rapat Menko Ekonomi, kami ingin melakukan perubahan. Jadi, pertama, kalau UMKM masih dikenakan agunan pasti akan sulit, karena UMKM ini enggak punya agunan. Yang harus berubah itu adalah justru pendekatan perbankan ya dan kami menggunakan *expert* juga. Ternyata di banyak negara, ada sekitar 140 lebih yang sudah tidak lagi menggunakan agunan, tapi pakai *credit scoring*. Nah, pertanyaannya memang apakah UMKM yang belum menghubungkan, terakses ke perbankan bisa di, di, lihat data digitalnya mengenai *track record digital* kesehatan keuangan mereka. Nah, dibalik di 140 negara itu, sebenarnya bisa diterapkan di Indonesia, itu bisa menggunakan dua data. Satu, data Telco mengenai mereka pembayaran pulsa, belanja di *online*, dan lain sebagainya, bisa dilihat, termasuk juga data pembayaran listrik. Nah, di beberapa negara itu sudah bisa itu, dengan dua data itu sudah bisa dilihat, tentu ini bukan satu-satunya.

Nah yang kedua yang kita akan usulkan itu penyalur KUR-nya diperluas. Ya sekarang ini *kan* 70% KUR itu disalurkan lewat BRI. Jadi kita akan nanti melibatkan semakin banyak bank, termasuk koperasi simpan pinjam yang punya likuiditas cukup, termasuk juga kita *fintech*, ya. *Fintech* sekarang juga sudah menjadi *partner* dengan bank untuk menyalurkan kredit kepada mereka yang *unbankable*.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Bapak menjawab pertanyaan saya, *kan*?

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (Drs. TETEN MASDUKI):

Iya.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Yang pertanyaan saya itu *kan*, Bapak mempunyai anggaran *nih*.

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (Drs. TETEN MASDUKI):

Bukan, Bu, begini jadi.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Pencapaian KUR 260.

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (Drs. TETEN MASDUKI):

Itu alokasi itu diputuskan di Menko Ekonomi lalu kemudian itu penyalurnya bank, ya, Bu. Nah, kami sebagai KPA hanya membayarkan subsidiinya.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Berapa subsidiinya itu?

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (Drs. TETEN MASDUKI):

10,05%, 10,5%.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Berapa besar subsidi yang Bapak bayarkan itu?

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (Drs. TETEN MASDUKI):

Ya sekitar kalau 46 triliun.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Berapa?

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (Drs. TETEN MASDUKI):

46 triliun.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Yang Bapak bayarkan 64 triliun?

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (Drs. TETEN MASDUKI):

46.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

46 triliun, kepada berapa debitur?

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (Drs. TETEN MASDUKI):

Itu kepada tadi, yang berapa.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Kepada 4,56 juta debitur itu tadi?

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (Drs. TETEN MASDUKI):

Ya. Jadi kalau penyalurannya itu memang otonom bank, ya, otonom bank. Jadi misalnya, tapi ada pendampingan-pendampingan, misalnya untuk yang mikro itu *kan* pendampingannya di daerah ya, pengaturan seperti itu. Jadi dampingi seperti itu. Nah, kami ngelihat ini enggak efektif, enggak efektif.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Enggak efektif ya?

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (Drs. TETEN MASDUKI):

Belum efektif, karena sebagian besar masih susah mengakses bank.

Lalu yang kita mau ubah tadi, diperluas kita penyalurnya dan kemudian ketiga, ekosistem. Nah kami ada beberapa *piloting*, kami juga sudah melihat di India, misalnya untuk terutama untuk pembiayaan bagi sektor *agriculture*, *aquaculture*. Di India itu memang dibangun ekosistem, ya, jadi karena ini pelaku sama di kita, sama lah, petani-petani kecil, perorangan, begitu, itu harus ada agregator-nya, nah, agregator-nya itu nanti koperasi. Nah, koperasi yang harus menjadi *offtaker* produk misalnya. Karena kami bisa punya *piloting* misalnya di koperasi di, di hortikultura, yang penting kan bank itu tidak takut uangnya macet, nah harus dipastikan produk petani itu ada yang *offtaker*-nya.

Jadi Amerika sudah ada *prepayment model* untuk tiga komoditi, jagung, kentang dan gandum, nah di India ada FPO dan FPC ya, ada *Farmers Producer Organization* yang diberi hak untuk membeli 100% produk petani dalam waktu *24 time*, 24 jam sejak panen, dan dia bisa mengakses ke perbankan dengan bunga, 3% tugasnya membeli itu. Sehingga bank enggak takut membayar, apa, membiayai produksinya, karena ada kepastian harga, kepastian pasar. Jadi NPL-nya, potensi NPL-nya hilang. Nah, ini yang enggak ada. Petani kita nih gapoktan, gapoktan itu ya enggak *bankable*, bukan kelembagaan. Nah, saya enggak, tidak akan mengusulkan FPO, karena itu harus ada perubahan undang-undang, baik-baik koperasi, karena kami sudah ada model. Jadi koperasi membeli tunai, tapi koperasinya kita harus perkuat kapitalnya supaya dia bisa membeli tunai.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Gimana, izin, Pak Ketua.

Bagaimana Bapak memperkuat *capital* daripada koperasi ini, sementara koperasi ini tidak di desa *nih*, Pak.

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (Drs. TETEN MASDUKI):

Nah sekarang ini kan kita hanya setahun ada hampir 2 triliun ya, 1,8 triliun, lewat LPDB, dengan persyaratan juga yang cukup ketat, karena kami tidak menentukan sendiri, karena ini *kan* BLU bersama Kementerian Keuangan, uangnya harus ada persyaratan yang cukup ketat.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Izin, Pak Ketua.

Kenapa saya tanya *nih*, Pak, *nih* orang-orang Bapak yang ikut sosialisasi juga sebenarnya tahu, pertanyaan dari masyarakat itu itu itu saja Pak, ketika kita turun sosialisasi, Pak. Karena kan kalau kita turun sosialisasi itu kan kita undang dari desa ini, desa-desa lah kebanyakan ininya yang datang, mereka selalu mempertanyakan permodalan, *kan gitu*, Pak, apakah itu petani, apakah ini, selalu menanyakan permodalan. Nah, ini yang orangnya Bapak juga enggak bisa jawab, maaf *aja nih*, enggak bisa menjawab. Karena memang permodalan dari mana, ya *kan*. Koperasi desa *aja* enggak ada, *kan gitu*, Pak, modal mau disalurkan lewat apa.

Nah, itu makanya dari pengalaman saya turun-turun ke masyarakat desa ke petani, UMKM desa, saya melihat urgensi daripada didirikan dan dihidupkan kembali yang namanya koperasi desa, Pak, pentingnya koperasi desa itu. Apakah koperasi desa ini nanti sifatnya itu perwakilan ya, Pak, ya, mungkin dari kabupaten ada ininya, perwakilan di desa atau bagaimana, Pak, karena selalu bagaimana kita mendapatkan modal, itu selalu yang menjadi pertanyaan. Ketika kita tanya berapa modal yang mereka harapkan didapat, ya kita juga kaget, enggak besar-besar amat, Pak, ya *kan*, di bawah 50 juta modal, di bawah 20 juta, nah itu kan kita enggak bicara modal besar, ya *kan*. Kalau kita bicara UMKM *kan*, UKM *gitu kan*, kita bicara di 500 juta yang enggak, enggak dikenakan pajak, *kan begitu*, Pak, itu kategorinya mereka, mereka cuman puluhan juta, Pak, untuk menghidupkan usahanya mereka *gitu*. Nah, ini gimana *nih* kita untuk, untuk apa namanya, bisa membantu daripada para petani kita dan lain-lain di dalam menghidupkan usaha-usaha mereka yang ada di desa-desa, Pak.

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (Drs. TETEN MASDUKI):

Memahami, Bu Evita, pentingnya koperasi sebagai ekosistem di tingkat produsen, misalnya di pedesaan, walaupun mungkin kita masih

dipertimbangkan kembali, karena model seperti KUD pernah dilakukan zaman orde baru dan gagal. Jadi memang pendekatan.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Kegagalannya kenapa, Pak?

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (Drs. TETEN MASDUKI):

Ya pertama, skala ekonomi, jadi untuk tingkat desa itu skala ekonominya enggak dapat.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Pak Ketua,

Bapak melihat Orde Baru, ketika saat Orde Baru pembangunan kita itu dari kota ke desa. Ingat, pembangunan kita setelah reformasi ini dari desa ke kota, Pak. Digelontorkan dana desa sekarang ini, Pak, *kan* begitu, *udah* ada, *udah* ada sentra-sentra ekonomi yang terjadi di desa-desa, Pak. Jadi kalau kita melihat zaman Orde Baru dulu, ya memang pembangunan enggak ada di desa, pembangunan itu adanya di kota kok zaman dulu, Pak, tapi kalau saya sekarang ke desa *nih*, Pak, itu luar biasa *loh* pembangunan di desa. Yang namanya perkebunan buah-buahan mereka, klengkeng mereka, apa semuanya itu, sangat-sangat luar biasa, Pak, usaha mereka, Pak, buah-buahan atau apa.

Jadi saya melihat potensi itu sangat besar potensi di daerah itu, Pak, nah apakah tidak bisa kita pikirkan? Maksud saya ini apalagi Pak Dirjen Koperasi ya, apa ini tidak menjadi, dengan melihat pembangunan usaha di desa-desa ini saat ini, apakah ini tidak menja, Bapak lihat *aja*, desa-desa wisata, sekarang *kan* berkembang, Pak. Dulu kan enggak ada desa wisata, sekarang desa wisata begitu berkembang. Nah, sekarang mereka kan perlu permodalan, ketika mereka mau membangun usaha-usaha di desa-desa mereka, tapi permodalan mereka itu *kan* enggak, enggak ada, Pak. Nah, bagaimana kalau kita mulai lewat LPDB ini apa, undang-undangnya diganti atau bagaimana, bisa membangun, mendukung apa namanya, koperasi-koperasi desa ini *loh*, Pak.

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (Drs. TETEN MASDUKI):

Ya ini memang kan sekarang ini tumpang-tindih, ada apa, BUMDES juga *kan*. Nah BUMDES itu kan sebenarnya kalau diarahkan itu BUMDES itu *kan* sebenarnya apa nomenklatur, bisa PT, bisa koperasi, ya walaupun memang dari pengalaman lalu BUMDES, KUD-KUD dulu *kan* menjadi penyalur pupuk dan lain sebagainya sangat besar, tapi begitu, ternyata itu enggak bisa tumbuh *sustain*, jadi sekarang itu hanya hitungan jari lah, KUD yang dulu sangat *powerful* yang bisa tetap bertahan, jadi kita mungkin enggak

bisa mengulang seperti itu. Nah, yang kita sedang tumbuhkan itu adalah sebenarnya bagaimana kita mengembangkan ekosistemnya supaya koperasi-koperasi pangan ini berkembang dan mungkin skalanya tidak harus desa.

Nah, karena itu saya sebenarnya tadi kalau kita lihat India dan Amerika di sektor pertanian, memang yang harus *dirubah* ini tadi sebenarnya alokasi dananya dari mana, *kan* gitu. Kalau kami harus *ngurusin* seluruh sektor pertanian, suruh misalnya tadi, membeli tunai 100% produk pertanian, enggak mungkin. India dan Amerika, India menggunakan konsep *pre-financing*, India FVO-nya atau koperasinya boleh pinjam duit ke bank *gitu*, bank dengan likuiditas yang besar. Nah, kita subsidi pupuk, kita subsidi alsintan, kita subsidi bibit, nah ini yang kita harus *rubah*, saya sudah bicara ini secara informal dengan presiden waktu Pak Presiden melihat *piloting* kita di Ciwidey yang sukses mengembangkan satu koperasi yang seperti tadi ya, di mana koperasi itu sebagai ekosistem bagi petani untuk menjadi *offtaker* ya, menjadi *offtaker* dari petani-petani kecil, langsung, tidak mungkin terhubung ke, ke *buyer*, ke *supermarket* atau ke industri, karena produknya kecil-kecil.

Nah, koperasi sebagai agregator produk sekaligus sebagai *offtaker*. Tapi dengan sendirinya dia membangun dua hal, koperasi menjadi *offtaker* ya, sehingga potensi NPL kemudian jadi enggak ada, sehingga bank itu sekarang mau biayai petani kecil, nah, ini tinggal di replikasi sebenarnya. Jadi kami punya pengalaman semacam ini. Dan ada beberapa yang lain, nah ini yang kita akan sedang kembangkan, Bu Evita.

Tapi saya paham maksud Bu Evita, memang karena tidak dibangun ekosistem di desa, sehingga petani-petani kecil enggak bisa mengakses pembiayaan. Nah, ini yang sekarang kami rumuskan, Bu, ya, nanti mudah-mudahan kami akan *share*, kami akan sekarang mulai akan mulai keliling ke Menteri Keuangan, menteri ini, untuk menyampaikan revisi kita. Sebab kalau dipaksakan, KUR ini enggak akan bisa, kalau masih disyaratkan agunan, enggak mungkin ya. Tempat usaha *aja nyewa*, KUR juga hanya untuk modal kerja, enggak mungkin bisa punya investasi, nambah investasi, susah. Jadi ini memang harus berubah ya.

Banyak negara yang sudah penyaluran kredit perbankan rasionya sudah sangat tinggi. Korea 80% untuk UMKM, Cina, Jepang, India sudah di atas ya 60%. Nah, kita masih 21, kemarin turun lagi jadi 19%, ini yang memang kita perlu evaluasi. Itu, Ibu Evita. Ya jadi banyak koperasi yang mengajukan anggaran ke LPDB, tapi belum memenuhi kriteria, ini kita inkubasi dulu, jadi kita ada inkubator, seperti itu. Nanti kita lagi pikirkan soal kemudahan lainnya.

Lalu mengenai ini, minyak makan merah. Minyak makan merah ini digagas waktu itu untuk mencari solusi bagaimana petani sawit itu bisa lebih sejahtera, sehingga mereka tidak tergantung menjual TBS-nya kepada industri, yang rata-rata dari kebun petani ke industri itu sangat jauh. Dan harga TBS itu memang fluktuatif, jadi bagi petani tidak nyaman, nah, sehingga kita putuskan kita beri, petani boleh menghilirisasi produknya. Dan ada teknologi minyak makan merah yang lebih sederhana dengan konsep *integrated farm*.

Jadi tadi pertanyaannya, kalau Pak Adi tanya, mau jual ke mana, Pak Profesor, mau jualnya ke mana? Ini jualnya terintegrasi Pak, jadi pabrik bahan bakunya di situ, pabriknya di situ, *market*-nya di situ. Jadi dengan 1.000 hektar itu akan melahirkan, memproduksi sekitar 7,5 ton, eh 7,2 ton minyak makan merah yang bisa diserap oleh 200.000 orang atau sekitar dua kecamatan di sekitar pabrik itu. Nah, kalau sekarang *kan* rata-rata dari lima pemain besar minyak itu *kan* CPO-nya dari Sumatera, Kalimantan ke Jawa dulu, balik lagi *kan* ke sana, sehingga mahal. Kami bisa murah tanpa subsidi. Jadi kita tidak takut, karena minyak makan merah Malaysia juga diekspor ke China dan di China juga dijadikan program *stunting* dan lain sebagainya.

F-PDIP (Prof (Assc) Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A.):

Berarti, izin, Pimpinan.

Berarti konsumen yang ditarget itu tidak, tidak, tidak *mass market* dong, tidak *mass market*.

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (Drs. TETEN MASDUKI):

Eenggak apa-apa, karena memang kita.

F-PDIP (Prof (Assc) Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A.):

Karena hanya di sekitar itu *aja*.

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (Drs. TETEN MASDUKI):

Tapi begini, Pak, kalau lihat agregatnya, *kan* lahan petani mandiri ini *kan* 40% ya, ditambah dengan PTP, saya kira kalau ini diprioritaskan untuk *supply* minyak goreng nasional, cukup. *Kan* luas sawit ini *kan* punya petani 6, 6 juta.

F-PDIP (Prof (Assc) Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A.):

Tapi fase komersialisasi ke pasar riil belum ada?

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (Drs. TETEN MASDUKI):

Ini *kan* baru *piloting*, kita baru *piloting* dan asumsinya kita diserap oleh dua kecamatan di sekitar pabrik, itu sudah cukup.

F-PDIP (Prof (Assc) Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A.):

Nah yang saya maksud, itu *kan* mereka menjadi konsumen sekaligus *kan*.

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (Drs. TETEN MASDUKI):

Ya.

F-PDIP (Prof (Assc) Dr. DARMADI DURianto, S.E., M.B.A.):

Nah itu *post buying behaviour*-nya dites enggak, dicek enggak itu?

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (Drs. TETEN MASDUKI):

Ya baru mulai, nanti kita tes.

F-PDIP (Prof (Assc) Dr. DARMADI DURianto, S.E., M.B.A.):

Enggak, enggak apa-apa, karena sudah ada yang konsumsi, *kan* bisa dicek, *gitu kan*.

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (Drs. TETEN MASDUKI):

Iya, iya. Ini baru mulai, ini *kan* karena kemarin itu, maaf saja, ini ada keterlambatan karena DED-nya juga ada berapa kali ada apa, kita melibatkan banyak kementerian ini, BUMN, BPDPKS, BPOM, BSN, banyak sekali. Jadi kemarin ada bongkar pasang soal DED ya, sampai kita akhirnya selesailah kemarin. Nah, ini tinggal percepatannya ya, dananya juga ada, ya. *Kan* ini kita menggunakan dana hibah dari BPDPKS, ya jadi ada dana petani di situ. Kita sudah hitung, kalau kita mau bangun 200 pabrik lagi, berapa? Paling 2,8 triliun ya. Ada 70 triliun duit kita di situ, ya.

F-PDIP (Prof (Assc) Dr. DARMADI DURianto, S.E., M.B.A.):

Makanya *gini*, Pak Teten, kalau dalam *marketing* itu *kan* harus di *market testing* dulu, bisa dibawa produk ini ke mana, dites *gitu*, supaya, supaya nanti kalau waktu perluasan, ini *market* menerima enggak, *gitu kan*. Jangan sudah produksi beras besar, berarti Bapak masuk ke *product, production concept* atau produk konsep, bukan *marketing concept*, jadi tidak di *market driven*. Nah, ini yang kita takutkan, *udah* bangun-bangun banyak ternyata *market* enggak bisa terima, nah, ini *kan* masalah *gitu*.

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (Drs. TETEN MASDUKI):

Inshaallah tidak, Pak, kami lihat, ini pengalaman Afrika dan-dan Malaysia sudah jalan, Pak.

F-PDIP (Prof (Assc) Dr. DARMADI DURianto, S.E., M.B.A.):

Ini *aja deh*, Bapak kirim sampel ke Komisi VI.

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (Drs. TETEN MASDUKI):

Boleh, boleh.

F-PDIP (Prof (Assc) Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A.):

Kita *cobain*, terus kirimnya agak banyak saya yang tes, kita kan, Bu Evita kan punya biro riset *tuh*, kita tes ke *market*. Kalau *market* enggak bisa terima, Bapak bikin pabrik banyak-banyak ya nanti bangkrut, Pak, pabriknya Pak, habis itu mau jual ke mana? Jadi jangan produk konsep atau *production concept*, tapi *market concept*, *marketing concept*, *market driven*, Pak.

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (Drs. TETEN MASDUKI):

Kalau kami *gini*, pertama ini *kan* koperasi, *kan* nanti yang membangun pabrik ini koperasi, dengan dnggota *aja* dengan 7 juta, 7,2 ton itu untuk anggota koperasi *aja* enggak cukup, itu satu, jadi *captive market*.

F-PDIP (Prof (Assc) Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A.):

Iya itu kan teori, Pak.

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (Drs. TETEN MASDUKI):

Iya, pengalaman Afrika dan dan Malaysia malah ekspor, Pak, ini pun kami dari Malaysia sudah minta ya, kita enggak cukuplah. Tapi *gini*, yang prinsip dasarnya, dari 40% lahan sawit, kalau ini diproduksi oleh petani, selain petani bisa meningkatkan kesejahteraannya tidak menjual TBS tergantung kepada industri besar, tapi suplai minyak makan yang sehat dan lebih murah, ini bisa tersedia.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Izin, Pak Menteri.

Itu kalau tidak, *gimana* ya, kalau harga TBS di bawah ekspektasi, mungkin *kan* mereka mau jual ke situ, apa jaminan kalau kemudian *market price*-nya lebih tinggi, bahwa mereka akan jual ke pabrik minyak goreng merah ini?

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (Drs. TETEN MASDUKI):

Enggak, kalau kita TBS dan CPO-nya pakai harga standar internasional, pabrik ini. Kalau *dimurahin* enggak akan dapat bahan baku. Jadi dengan harga sekarang misalnya 14,5, itu tanpa subsidi ya? Minyak

makan kita kan harga segitu dengan subsidi 6.000. Saya bilang kemarin ke Pak Presiden, “Pak, ini tanpa subsidi, kita bisa bilang 14, 15, tapi kalau di subsidi 6.000 kita bisa jual 8.000, laku di rakyat”. Kita *udah* coba pakai *chef* yang paling kritislah, Chef Juna, dia muji luar biasa *nih*, dicoba dengan sampai suhu tinggi pun, 170.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Dicoba sampai berkali-kali, dipakai menggoreng sampai hitam, enggak, Pak? Dilihat kandungan, kandungannya, Pak. Karena kalau ini dijual ke bawah untuk yang gorengan seperti kita tahu, *tuh* minyak sampai hitam *banget tuh* dipakai, pernah uji laboratorium enggak, Pak?

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (Drs. TETEN MASDUKI):

Udah diuji, *udah*. Jadi itu yang menguji PPKS, diuji pakai *deep fried* 175, berapa, sampai beberapa kali, 11 atau, tetap, dan sudah diuji BPOM. Jadi ini kami, DED-nya segala macam sudah BPOM. Jadi ini kemarin begitu *launching*, sudah langsung punya izin edar, karena dari sejak awal, aman ini dari segi produksi. Tapi tadi, demokrasi industrinya terjadi. Jadi ini, nah nanti Pak Deddy misalnya di sana, siapkan, memang ini koperasi.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Jangan misalnya ini, harus janji *nih*, Pak Menteri.

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (Drs. TETEN MASDUKI):

Harus, karena ini hak petani, Pak. Ini kebijakan pemerintah untuk setiap 1.000 hektar, satu pabrik ini, karena batas minimumnya 1.000. Kemarin ada yang minta bisa enggak 200 hektar, nah, itu nanti enggak, enggak masuk skala ekonominya *gitu*. Kalau ini *sih* sudah kebijakan, nah, tinggal percepatannya saja. Nah, Pak Presiden kemarin saya minta, Pak, ini karena masih ada kesulitan soal percepatan pembiayaannya, beliau akan panggil

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Izin, Pak Menteri, biar *clear*.

Untuk tapak bangun, itu apakah dari lahan petani atau pemerintah daerah yang menyediakan?

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (Drs. TETEN MASDUKI):

Lahan petani ini.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Lahan petani?

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (Drs. TETEN MASDUKI):

Lahan petani, lahan koperasi lah, Pak.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Lahan koperasi itu ya?

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (Drs. TETEN MASDUKI):

Lahan koperasi.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Untuk, berapa luasnya, Pak, untuk pabrik?

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (Drs. TETEN MASDUKI):

Satu hektar, minimal.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Satu hektar? Termasuk penampungan?

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (Drs. TETEN MASDUKI):

Kalau terintegrasi antara CPO dengan minyak makannya, perlu 2 hektar.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Dua hektar, oke.

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (Drs. TETEN MASDUKI):

Jadi silakan, jadi ini tinggal, Bapak juga bisa ke BPDPKS *kan* untuk mempercepat.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Iya *dong*, kalau enggak dari mana bahan bakunya?

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, SE., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Pak Menteri.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Tadi *kan* sudah dibilang, minimal 1.000 hektar.

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (Drs. TETEN MASDUKI):

Karena ini enggak diberikan untuk korporasi, ini kebijakan afirmasi untuk

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Iya, iya, harus koperasi petani.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, SE., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Pak Menteri, peran pemerintah di mana? Modalnya dari mana itu, pemerintah?

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (Drs. TETEN MASDUKI):

Ada dua skema, Pak. Satu, untuk pembangunan pabriknya, itu memang dibiayai hibah dari BPDKS ya, di mana di situ memang ada hak petani ya, cukup besar. Ya dari *piloting* kira-kira itu ya nanti. Lalu ada *working capital*. Nah, *working capital* itu koperasi yang, ini sudah koperasi sawit sebenarnya sudah cukup punya uang ya, tapi kami juga dari LPDB kita dampingi, untuk *working capital*-nya. Ya jadi karena ini sih cukup bagus dan ini bisa jadi proyek nasional, di mana

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Maksudnya *working capital* gimana, Pak? Kalau tadi hibah *kan* jelas ya.

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (Drs. TETEN MASDUKI):

Pembangunan fisiknya, hibah.

DEPUTI BIDANG PERKOPERASIAN (AHMAD ZABADI, S.H., M.M.):

Izin, Pak Menteri, Pak Pimpinan.

Terkait dengan skema pembangunan pabrik minyak makan merah ini ada dua skema. Satu, skema kemitraan, yaitu kolaborasi Kementerian Koperasi dengan BPDPKS dan PTPN. PTPN berikut dengan anak perusahaan, dengan anak-anak perusahaannya, di bawahnya ada PPKS, Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Kemitraan ini untuk pembiayaannya, untuk investasinya, sepenuhnya dari BPDPKS. Kemudian untuk modal kerjanya, bila koperasi ini memerlukan dukungan modal kerja, itu akan didukung dari LPDB.

Kemudian skema yang kedua, skema kemitraan. Skema kemitraan ini dengan mempertimbangkan kemampuan dari atau kapasitas dari koperasinya. Jadi contoh tadi, 6 yang kami laporkan, 3 itu, 3 yang tadi semuanya di, di Sumatera Utara, itu skema kemitraan, ya dengan menggunakan dana BPDPKS untuk investasinya. Sementara 6 lainnya adalah dengan skema mandiri, itu adalah biaya dari pihak koperasinya. Nah, untuk modal kerja, tetap nanti akan dapat dukungan dari LPDB, *gitu*.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Apa untungnya mereka sendiri yang *modalin*, Pak? Koperasinya.

DEPUTI BIDANG PERKOPERASIAN (AHMAD ZABADI, S.H., M.M):

Dalam perhitungan bisnis DED kami itu, ROI-nya itu 4k 4,3 jadi relatif menguntungkan, Pak, karena investasinya juga tidak mahal ,kira-kira itu satu pabrik itu 15 juta, eh 15 miliar, kurang lebih *gitu*.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Lima belas miliar itu untuk pabrik minyak goreng?

DEPUTI BIDANG PERKOPERASIAN (AHMAD ZABADI, S.H., M.M):

Minyak goreng, minyak makan merahnya, ya. Kalau dia nanti terintegrasi dengan pabrik CPO, kami sudah hitung, itu kurang lebih sekitar 28 miliar.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Karena pasti lebih ke sana, Pak? Kalau saya arahnya apa namanya, pemikirannya, ini kan dengan asumsi kayak Kaltara itu Pak, PKS-nya itu kan terbatas, hanya ada beberapa, ada di Bulungan sama di daerah Nunukan *aja*, satu, jadi pasti harus terintegrasi, enggak bisa hanya minyak goreng.

DEPUTI BIDANG PERKOPERASIAN (AHMAD ZABADI, S.H., M.M):

Jadi yang terintegrasi nanti, Pak, tetap kapasitas sama, karena nanti memerlukan TBS per hari 50 ton, lalu diproses menjadi CPO 10 ton, setiap 10

ton CPO itu akan menjadi 7,2 minyak makan merah, ini. Itulah kenapa harus 1.000 hektar, yang penting kemudian dikonsolidasi oleh koperasi.

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (Drs. TETEN MASDUKI):

Sekalian *jelasin* itu, Pak, Solusi Nelayan.

DEPUTI BIDANG PERKOPERASIAN (AHMAD ZABADI, S.H., M.M):

Baik, terkait dengan Solusi Nelayan khususnya Bu, Bu Evita dan tadi juga dan Pak Dedy Sitorus, itu pertama memang ada apa, ini karena kerja, kerja kolaborasi kami, Kementerian Koperasi dengan Kementerian BUMN, yang menugaskan kemudian Pertamina, ini kemudian ada penetapan terkait dengan alokasi solarnya. Nah, ini adalah menjadi wilayah BPH Migas. Itulah mengapa kemudian kasus untuk di Tarakan ini terkait dengan persetujuan alokasi solar subsidi dari BPH Migas, setelah keluar itu, baru kemudian Pertamina dapat memberikan persetujuan untuk pendirian SPBUN Nelayan.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Pertanyaannya, bisa dibantu enggak, Pak, biar cepat, sudah lama banget.

DEPUTI BIDANG PERKOPERASIAN (AHMAD ZABADI, S.H., M.M):

Bisa, kami ada koordinasi dengan BPH, siap, kami bantu, Pak.

Izin lapor, Bu Evita, terkait dengan Pati, kami sudah beberapa kali bahkan kami kunjungi ke, ke pihak apa, kelompok nelayannya, koperasinya dan juga pihak dinas. Hanya saja memang mereka, yang di Rembang? Pati, ya maksud saya yang di Pati ini, yang kami tindak lanjuti kemarin, awal pembicara *kan* awal kemarin Pati, kami sudah tindak lanjuti, dan kami masih menunggu usulan, izin, maaf, kami mendahulukan Ibu, *kan* nanti dengan Pak Menteri, Bu, siap.

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (Drs. TETEN MASDUKI):

Saya *tugasin* dulu, Bu.

DEPUTI BIDANG PERKOPERASIAN (AHMAD ZABADI, S.H., M.M):

Saya izin, Bu, biasanya kita ini dulu, Bu, Kopasus maju duluan, lihat dulu *gitu*.

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (Drs. TETEN MASDUKI):

Basisnya kan koperasi juga, Bu.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Jadi kemarin karena mau pemilu, Mbak Evita, nanti habis pemilu.

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (Drs. TETEN MASDUKI):

Boleh, boleh, boleh. Ini saya (**suara tidak jelas 1.42.47**) sebenarnya kalau ada koperasinya, *kan*, soal kuota aja yang disampaikan Pak Adi, saya baru tahu Pak Adi, ya harus koperasi, koperasi.

DEPUTI BIDANG PERKOPERASIAN (AHMAD ZABADI, S.H., M.M):

Nah, kami turun makanya, Bu, ke dinas, kami juga ke nelayan dan itu kemudian kami dijadikan, akan segera dikirim proposal usulannya *gitu*.

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (Drs. TETEN MASDUKI):

Karena ini kan yang punya konsepnya *aja*, Bu, ini kan yang punya ininya BUMN. Cuma konsep kami, nanti solar subsidi itu enggak akan diselundupkan lagi seperti sebelumnya, dijual di tengah laut, karena kita pakai data digital *gitu*, itu. Jadi ini sebenarnya sistem kami yang diadopsi oleh Pertamina. Iya, *monggo-monggo*, kita *siapin*. Jadi aman, Pertamina dengan program ini aman, enggak takut lagi diselundupkan, enggak tahu takut dijual kepada pihak yang bukan yang berwenang, *gitu*, karena.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Kalau di bawah justru itu lahannya, Pak, bukan soal takut, yang masalah itu di atas sama rakyat. Tapi saya tunggulah, Pak Menteri, main ke Kaltara, Pak Menteri, kita lihat rumput laut.

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (Drs. TETEN MASDUKI):

Kalau rumput laut, tolong *dijelasin*, Pak Hanung, kita juga lagi garap rumput laut, Pak Hanung, silakan.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Karena rumput laut itu untuk derivatifnya bisa sampai 500 produk *loh*, kalau sampai kita enggak *ambilin* untuk Kemenkop dan UMKM, saya kira kita rugi besar.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, SE., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Diselesaikan cepat, Pak.

DEPUTI BIDANG USAHA KECIL DAN MENENGAH (Ir. R.S HANUNG HARIMBA RACHMAN, S.E., M.S.) :

Izin, Pak Menteri.

Jadi kami sedang, memang rumput laut salah satu prioritas kita, Pak, seperti yang tadi Bapak sampaikan. Jadi kita memang sekarang baru tahap melakukan kajian, mudah-mudahan kita bisa putuskan tahun ini dan kita lakukan pembuatan *piloting*.

Nah, satu hal yang kita memang agak perlu hati-hati, mengata, mengapa kita perlu kajian, karena ada 9 pabrik rumput laut yang pernah dibangun itu mangkrak, Pak. Jadi kami perlu benar-benar berhati-hati, karena kita enggak mau itu terjadi. Jadi tadi benar yang Bapak sampaikan, ada beberapa derivatif yang bisa sampaikan, termasuk obat anti leukimia, pengobatan leukimia, itu bisa dibuat, kemarin hasil kajian-kajian kami.

Nah, kami perlu benar-benar mendalami dan prioritas kami sebenarnya saat ini adalah kita ingin memanfaatkan yang sedang mangkrak, Pak, karena itu akan lebih cepat *gitu* ya, prioritaskan, kalau memang perlu bangun, baru kita akan bangun, jadi kita lengkapi alat-alat atau kita sempurnakan ekosistem yang ada yang di mangkrak itu, kemudian nanti kita sempurnakan.

Beberapa itu adalah salah desain, Pak, kalau menurut pengamatan kami. Jadi salah satu, kalau untuk karagenan itu butuh air bersih, sementara pabriknya dibuat di tepi laut. Jadi itu jadi *problem*, jadi susah air. Nah, itu beberapa hal, jadi kami mencoba menghindari kejadian yang sudah terjadi tadi, mangkrak, tapi kami akan coba evaluasi juga yang sudah kita bangun. Mudah-mudahan tahun ini, Pak, kita bisa alokasikan.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Jangan kelamaan kajiannya, Pak.

DEPUTI BIDANG USAHA KECIL DAN MENENGAH (Ir. R.S HANUNG HARIMBA RACHMAN, S.E., M.S.) :

Iya, Pak.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Saya kira enggak terlalu sulit itu. Jadi kalau misalnya Kaltara, Pak, kan dia secara nasional nomor 3 terbesar dan yang merahnya itu, rumput laut merahnya itu, betul-betul kualitas premium, Pak. Setahu saya, saya paham betul masalah air bersih untuk itu, tapi pabriknya tidak harus dibangun di Pulau Tarakan atau di Nunukan, misalnya, bisa di Bulungan, yang sungainya air bersihnya banyak begitu, cukup, *gitu*, atau di Malinao atau di KTT bisa dipakai, Pak.

DEPUTI BIDANG USAHA KECIL DAN MENENGAH (Ir. R.S HANUNG HARIMBA RACHMAN, S.E., M.S) :

Saat kabupaten ini apa namanya, apa namanya, Kutai Kartanegara, itu sedang membuat pabrik rumput laut juga, Pak.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Kutai Kartanegara, rumput lautnya di mana? *Wong* dia di sungai, di pedalaman situ.

DEPUTI BIDANG USAHA KECIL DAN MENENGAH (Ir. R.S HANUNG HARIMBA RACHMAN, S.E., M.S) :

Bukan, bukan, Kukar, Kukar.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, SE., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Ya nanti dicek lagilah pokoknya.

DEPUTI BIDANG USAHA KECIL DAN MENENGAH (Ir. R.S HANUNG HARIMBA RACHMAN, S.E., M.S) :

Iya nanti kita, kita sampaikan.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, SE., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Sudahlah.

Iya, kemudian mengenai belanja LKPP, Pak, jadi dari 235.000 UMKM penyedia atau sekitar 80% dari total penyedia itu, dia menyerap 268 triliun yang mereka serap ya dari total anggaran yang dialokasikan untuk UMKM itu 46, eh 466 triliun. Nah, ini ada beberapa persoalan, baru 55%, itu salah satunya tidak ada kesesuaian, Pak, antara produk yang dibutuhkan oleh kementerian dan lembaga dengan UMKM yang masuk di situ, terus kemudian, yang *listing*.

Kemudian memang ada beberapa kementerian/lembaga itu cenderung membelanjakan ke UKM tertentu *gitu* ya, itu-itu terus saja, nah ini yang memang yang kita dorong untuk mereka untuk supaya ini. Beberapa langkah yang kita lakukan adalah kita minta mereka mencari UMKM-nya masing-masing K/L-K/L tadi, supaya dipastikan mereka yang akan beli, terus kemudian kita melakukan juga bantuan mengkurasi UMKM-UMKM yang tersedia belum terbeli tadi kita kurasi, terus kita lakukan pembinaan.

Demikian, Pak Menteri.

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (Drs. TETEN MASDUKI):

Terima kasih.

Ibu Azizah, soal wirausaha, soal *startup* dan mungkin pendataan, silakan, singkat saja.

DEPUTI BIDANG KEWIRAUSAHAAN (Ir. SITI AZIZAH, M.B.A.):

Baik, terima kasih.

Yang terhormat Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi VI,

Untuk pendataan, dari beberapa pertanyaan dari anggota, yang pertama sekali adalah ada beberapa hal yang mendorong kita melakukan pendataan langsung, karena memang pada saat ini atau sebelum ini, banyak data tapi tidak terintegrasi dan tidak terstandarisasi. Jadi beberapa kementerian memiliki apa, data-data dan itu selalu digunakan untuk program, dan pada akhirnya mungkin programnya bisa-bisa tidak tepat sasaran. Itu sebabnya sejak tahun 2021 kita membuat atau merencanakan untuk melakukan pendataan lengkap secara langsung.

Jadi prosesnya adalah kita mendatangi langsung para pelaku UMKM di 34 provinsi di awal, jadi urutannya adalah di tahun 2022 kami mendata di 240 kabupaten/kota di 34 provinsi dan kita mendapatkan 9,1 juta pelaku UMKM, KUMKM. Jadi koperasi usaha mikro, kecil dan menengah. Di tahun lalu kita melanjutkan terus bekerja sama dengan BPS, *sorry*, di tahun 2022 kita melalui mekanisme dekonsentrasi, jadi kita bekerja sama dengan para *enumerator* di daerah untuk melakukan pendataan langsung. Di tahun 2023, kita bekerja sama dengan BPS untuk melakukan pendataan di sisa daerah, itu di 215 kabupaten/kota di 32 provinsi dan kita menghasilkan 4,3 juta.

Nah, apa yang ada, datanya sebetulnya sangat lengkap. Jadi ada 7 variabel inti yang kita data, itu mulai dari identitas pelaku usaha, kemudian identitas usaha dan badan usahanya sendiri. Jadi dalam hal ini ada nama, *by name*, *by address*, lengkap, kemudian ada NIK, kemudian ada juga karakteristik usahanya itu sebenarnya apa, di bidang apa, kemudian berapa banyak sumber daya manusia yang apa, membantu usaha tersebut, jadi dalam hal ini karyawan, kemudian bagaimana proses produksinya dan bisnisnya seperti apa, dan sampai dengan status keuangan. Jadi 7 aspek ini yang kita tanyakan di dalam *questioner*, itu yang sudah kita, kita mulai di 2 tahun yang lalu. Dan kita saat ini sudah bisa diakses untuk data agregat kalau umum karena ini datanya sifatnya rahasia, tapi untuk kementerian/lembaga atau daerah, mereka sudah bisa memanfaatkan dengan mendapatkan hak akses.

Tahun ini kita akan lanjutkan terus karena ada beberapa masukan dari teman-teman di Bappenas bahwa data ini sangat dibutuhkan oleh, tidak hanya oleh Kementerian Koperasi dan UKM, tapi juga oleh kementerian lain,

itu sebabnya tahun ini atau tahun 2024 kita akan melanjutkan dengan memadupadankan data dari regsosek dan dari situ nanti kita akan terjun ke lapangan untuk melengkapi data-data yang belum ada di regsosek. Jadi diharapkan tahun ini kita akan menambah lagi 4 juta, jadi tadi pertanyaan Bu Evita apakah ini akan selesai? Akan selesai, Bu, jadi kita sudah memprediksi dalam 3 tahun ini atau sejak tahun ini, ditambah 1 tahun kemudian kita akan selesai dengan pendataan. Karena tahun lalu BPS sudah melakukan sensus ekonomi pertanian, mereka mendapatkan sebanyak 24, 29,4 juta, jadi secara total saat ini pemerintah sudah memiliki data kurang lebih 42 juta, sisanya akan kita lanjutkan dalam 2 tahun ini. Jadi itu yang,

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Jadi, kalau Ibu 200 tambah sekian, sudah hampir ter-cover semua *nih*, Pak, Bu, pendataannya se-Indonesia *nih* kalau saya lihat dari laporan tadi *kan*, Bu, ya. Kalau saya *cuman* minta data untuk Dapil saya *aja* bisa enggak? Harusnya bisa *kan*? Nah, sebagaimana saya bisa mengakses data UMKM yang ada di dapil saya, Bu, sehingga ketika ada program, ketika ada sosialisasi, nanti yang dilakukan, itu ya kita bisa undang mereka, *gitu loh*, Bu, itu jadi kita, kita enggak minta data lengkapnya saja tapi langkah, nama perusahaan alamat atau apa ya, Bu, ya, jadi apakah,

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (Drs. TETEN MASDUKI):

Pak Ketua, memang Bappenas berkeinginan sekali ini program dilanjutkan, karena baru kali ini punya data sebenarnya. Jadi datanya bukan digunakan untuk kami *aja*, untuk keseluruhan, untuk bansos dan lain sebagainya. Jadi ini memang menjadi, jadikan program prioritas oleh Bappenas juga dan kita kerjakannya dengan benar.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Jadi data ini Ibu dapat dari dinas setempat?

DEPUTI BIDANG KEWIRAUSAHAAN (Ir. SITI AZIZAH, M.B.A.):

Tidak, tidak, kita survei langsung, justru malah sekarang dinas yang minta ,

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Bagaimana Ibu melakukan surveinya, Bu?

DEPUTI BIDANG KEWIRAUSAHAAN (Ir. SITI AZIZAH, M.B.A.):

Melalui enumerator, kita jadi punya enumerator di tahun yang lalu sebanyak 29.000 orang. Tahun 2023 kita bekerja sama dengan BPS, mereka melalui BPS daerah. Jadi ini survei langsung, Bu, sensus disebutnya. Jadi kita

bertemu atau para enumerator, para pesurvei itu, bertemu langsung dengan pelaku UMKM, untuk menanyakan semua data yang ada di kuesioner.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Ini menarik *nih*, Pak, bertemu langsung dengan pelaku UMKM. Yang anehnya dan lucunya ketika kita kumpulkan orang, acara sosialisasi ini, saya tanya “Bapak-Ibu yang bergerak di UMKM, siapa? tunjuk tangan”, kita enggak usah ngarang lagi, pembicara Bapak ada di situ. Diam, enggak ada yang tunjuk tangan. “Siapa yang punya warung”, tunjuk tangan, “Siapa yang jualan bakso”, tunjuk tangan. Mereka itu tidak tahu bahwa mereka punya warung, mereka jual rokok, mereka jualan bakso, bahwa mereka adalah pelaku UMKM, itu fakta di lapangan, itu terjadi, Bu, bahwa mereka itu adalah pelaku UMKM *gitu*.

Jadi yang, kalau Ibu memakai, Ibu mengatakan orang langsung survei, saya aja di lapangan nanya, “Ayo, pelaku UMKM, siapa”, tunjuk tangan, “Siapa jualan rokok, siapa jualan bakso, siapa jual ini”, baru pada tunjuk tangan, tanya mereka, “Sudah ada yang punya NIB”, enggak ada yang tunjuk tangan.

DEPUTI BIDANG KEWIRAUSAHAAN (Ir. SITI AZIZAH, M.B.A.):

Maaf, Bu Evita, jadi tahun 2022 yang kita survei itu adalah pelaku usaha yang menetap, artinya mereka tidak bekerja berpindah-pindah dan mereka ada di apa, di bangunan *temper*, sementara atau jadi menetap, Bu, itu tahun 2022, 2023 masuk, Pak, mikro selama dia menetap, 2023 kita lanjutkan dengan menetap dan ada tambahan tidak menetap tapi tidak terlalu banyak. Nah, baru tahun ini, Bu Evita, kita baru akan terjun untuk yang tidak menetap, jadi itu akan kita padu padankan dengan data.

F-PDIP (Prof (Assc) Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A.):

Berarti yang mikro banyak enggak dapat, kalau yang mikro *kan* dia enggak menetap, yang ultra mikro tidak dapat.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, SE., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Sebenarnya kalau kasusnya kayak Bu Evita, mereka enggak sadar enggak apa-apa, yang penting *surveyor* tahu kalau mereka UMKM ada di situ. Mungkin mereka ga sadar, istilah UMKM *aja* enggak tahu mereka.

F-PDIP (Prof (Assc) Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A.):

Tetapi ini masuk banyak dapatnya yang klasifikasi yang kecil ya? Mikro? Ultra mikro enggak dapat, belum dapat. Total sudah berapa, ini mikro, mikro total dapat berapa?

DEPUTI BIDANG KEWIRAUSAHAAN (Ir. SITI AZIZAH, M.B.A.):

Sampai tahun ini totalnya sudah 13,4 juta.

F-PDIP (Prof (Assc) Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A.):

13,4 juta itu mikro ya.

DEPUTI BIDANG KEWIRAUSAHAAN (Ir. SITI AZIZAH, MBA):

Eenggak, semua.

F-PDIP (Prof (Assc) Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A.):

Yang menetap? Mikro yang tidak menetap *kan* ada juga *gitu*.

DEPUTI BIDANG KEWIRAUSAHAAN (Ir. SITI AZIZAH, M.B.A.):

Boleh, boleh, boleh, sebentar bisa diakses sebetulnya untuk mengetahui Kabupaten Grobogan itu berapa bisa, Bu, kalau secara agregat, ya.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, SE., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Cukup ya? Pak Harris sudah *ngingat* kita, Pak Harris mau buka katanya Pak Harris.

DEPUTI BIDANG KEWIRAUSAHAAN (Ir. SITI AZIZAH, M.B.A.):

Oke, mungkin satu lagi, Pak Ketua, untuk yang *startup* atau wirausaha, tadi dipertanyakan jumlahnya, wirausaha baru sebanyak 1 juta target kita di tahun ini. Nah, ini sebetulnya kita tidak bekerja sendiri Bapak-Ibu sekalian, kita bekerja dengan 27 lembaga dan kementerian yang mana mereka semua punya program untuk wirausaha, jadi sudah kita data, mereka sudah melakukan berapa program, itu sebabnya keluarnya seolah-olah *kok* banyak benar yang kita ini.

Nah, khusus untuk Kementerian Koperasi, sejak tahun 2022 ini, Pak Menteri sendiri yang terjun langsung untuk mensosialisasikan wirausaha kepada mahasiswa, kenapa? Karena kita apa, yang kita lihat saat ini atau objektif kita adalah menghasilkan wirausaha yang berpendidikan tinggi. Itu sebabnya kita bertemu dengan mereka karena mereka adalah calon-calon wirausaha. Tahun ini sudah kita naikkan levelnya, jadi kita sekarang mencari para wirausaha mapan atau mereka yang sudah punya usaha sebanyak, eh selama 3,5 tahun.

Nah, hubungannya memang tadi disampaikan juga beberapa data bahwa 70% *death of valley* untuk para *startup*, nah, kita punya program khusus Bapak-Ibu sekalian, melalui program inkubasi. Jadi kita sudah bekerja sama dengan kurang lebih 20 inkubator yang *mostly* adalah perguruan tinggi, untuk mereka melakukan proses inkubasi selama 5 sampai 6 bulan. Jadi pada dasarnya para *startup* ini kita dampingi dan betul tadi kata Ibu Evita, di

ujung, mereka selalu memberikan masukan pada kita adalah dua sebetulnya *challenge* mereka, yang pertama, *market*, yang kedua, pembiayaan.

Itu sebabnya kita enggak lepas, Bu. Di, di akhir dari proses kita mengadakan *demo day*, kita mempertemukan mereka dengan para calon *buyer*, *take over* apa, *oftaker* dan *buyer* lokal dan di luar, sekaligus juga pembiayaan, pembiayaan ini perbankan dan non-perbankan. Artinya adalah proses yang kita lakukan ini selama 5-6 bulan itu untuk diharapkan bisa mengembangkan para *startup* ini supaya usahanya meningkat.

F-PDIP (Prof (Assc) Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A.):

Ini sedikit *aja*, Pak Menteri.

Saya pengen tahu *aja*, pengentasan kemiskinan ekstrem ini intervensinya seperti apa ini. Iya, iya, biar *bypass* ke sana *aja*.

DEPUTI BIDANG KEWIRAUSAHAAN (Ir. SITI AZIZAH, M.B.A.):

Oke, jadi yang tadi Bapak sampaikan bahwa Indonesia ini tercatat ada 2.534 kurang lebih *startup*, memang jumlahnya begitu, Pak, enggak di, enggak apa, enggak, enggak genap. Nah, 500, kurang lebih 500-nya ada di-di bawah binaan kami, dan kami itu melakukan *crosscheck* setiap tahun. Jadi yang dari 2022 itu, tahun lalu kita *crosscheck*, seperti apa usaha mereka. Ada yang *dying* memang, karena memang produknya tidak terlalu apa ya, tidak terlalu inovatif, jadi mereka sudah bersaing dengan teman mereka sendiri.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Saya kira itu *problem*, Bu, jadi kalau tadi kesimpulannya *market* dan pembiayaan, itu sama dengan masalah bapak dan kakeknya. Yang saya takut, imajinasinya yang bermasalah. Ya kalau kita lihat itu produk-produk Korea segala macam itu *kan* imajinasi, *packaging* dan segala macam. Saya enggak yakin dikasih uang *tuh* bisa selesai masalahnya, saya kira perlu dilihat lagi itu, Bu.

DEPUTI BIDANG KEWIRAUSAHAAN (Ir. SITI AZIZAH, M.B.A.):

Ya, ya jadi izin, Pak Menteri.

Bapak-Ibu sekalian,

Saya kan ketemu Ibu di Solo, Ibu lupa.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, SE., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Bukan, Bu Evita, bukan Bu, Bu Ev, Bu Evita terlalu fokus ke Pak Menteri.

DEPUTI BIDANG KEWIRAUSAHAAN (Ir. SITI AZIZAH, M.B.A.):

Aduh, saya biasanya duduknya sebelah sana, Bu, baru hari ini diputar.

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (Drs. TETEN MASDUKI):

Mungkin dijelaskan juga. Untuk pengembangan *startup* ini kita kerja sama juga dengan beberapa negara, *sebutin*, Mbak.

DEPUTI BIDANG KEWIRAUSAHAAN (Ir. SITI AZIZAH, M.B.A.):

Iya, jadi untuk meningkatkan kapasitas dari para inkubator, kita bekerja sama, kita belajar dulu awalnya Bapak-Ibu sekalian karena inkubator di Indonesia ini kita tahu belum semua pada level yang cukup untuk membina para *startup*. Jadi kita belajar dari Australi, kita belajar dari *Melbourne*. *Melbourne* itu memang cukup *advance* karena University of Melbourne itu punya inkubator yang sudah terpisah dari universitasnya., Kemudian dari situ kita belajar bahwa memang membina *startup* tadi betul, Pak, *death of valley* itu berbahaya, jadi kita harus dampingi mereka 3 sampai 5 tahun itu yang sangat krusial.

Yang kedua, kita juga belajar dari Korea, bahwa Korea ini punya program *startup* yang sangat bagus. Nah, itu sebabnya sekarang kita sudah kolaborasi dengan mereka untuk juga mengembangkan *startup* kita sampai ke level *business matching* dengan UKM atau *startup* mereka, dan kita juga belajar dari Jepang. Jadi dari pembelajaran ini, tahun ini kita akan maju satu langkah supaya inkubator kita juga meningkat kapasitasnya, jadi bukan cuma *startup*-nya *aja* yang kita lakukan peningkatan kapasitas tapi juga di inkubator.

Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, terima kasih.

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (Drs. TETEN MASDUKI):

Terakhir mungkin kemiskinan ekstrem, Pak Ketua.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, SE., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Silakan, tapi saya agak protes penjelasan Ibu tadi, katanya ini Pak Menteri sendiri yang turun langsung ini, *loh kok* dibiarkan menterinya sendirian.

DEPUTI BIDANG KEWIRAUSAHAAN (Ir. SITI AZIZAH, M.B.A.):

Loh artinya itu *kan*

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, SE., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Mbok diajak Bu Evita ini.

DEPUTI BIDANG KEWIRAUSAHAAN (Ir. SITI AZIZAH, M.B.A.):

Pak Menteri itu komitmen sekali.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Ajak-ajak Pak Ketua, Bu, jangan sama Bu Menteri, eh Pak Menteri *aja*.

F-PDIP (Prof (Assc) Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A.):

Pimpinan, ini menarik *nih*, 6 PDI Perjuangan, 1 Golkar.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, SE., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Iya memang yang mimpin Golkar.

F-PDIP (Prof (Assc) Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A.):

1, 2, 3.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Ya enggak apa-apa lah, kita kasian.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, SE., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Silakan, lanjutkan ya.

DEPUTI BIDANG USAHA MIKRO (DR. YULIUS, M.A.):

Saya singkat saja, Pak. Jadi terkait dengan kemiskinan ekstrem, pertama siapa yang disasar? Yang disasar itu dari desil 1 sampai desil 4, ya berarti *kan* kita bisa pahami bahwa kualitas mereka dibanding desil yang lain itu jauh.

Nah, pertama fokusnya yang kita kerjakan adalah di daerah sekitar kemiskinan ekstrem itu. Kenapa begitu? Mereka *kan* kalau kita, *kan* fokus kita adalah kegiatannya pemberdayaan, kalau kita melakukan pelatihan kepada orang kemiskinan ekstrem, tentunya kita berpikir makan *aja* susah, berpikir susah, kita latih. Nah, jadi kita lihat kita akan mendorong di sekitarnya dengan harapan masyarakat di sekitarnya jika mereka bisa melanjutkan ekonomi, yang bukan orang kemiskinan ekstrem, mereka bisa menyerap tenaga, ya ini salah satunya pelatihan, menyerap tenaga kerja dari orang kemiskinan

ekstrem ke lokasi di sekitarnya, jadi itu kira-kira dan anggaran kita, datanya dari pemerintah.

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (Drs. TETEN MASDUKI):

Dari, ini kan di bawah koordinasi Menko PMK, ya jadi sudah ditetapkan kabupatennya, datanya ditetapkan, kita masuk. *Logic*-nya *gini*, biasanya untuk program pengetas kemiskinan, si miskinnya dilatih menjadi wirausaha. Menurut kami itu *impossible*. Kita lebih baik mengembangkan usaha yang ada di sekitar daerah-daerah miskin sehingga bisa terserap ada lapangan kerja. Iya, kalau miskin kan udah miskin *kan*, pendidik iya, *uneducated*, sebagian disabilitas, enggak mungkin bisa kita siapkan mereka jadi *entrepreneur*, enggak bisa.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Makanya kita berharap tadinya setiap keluarga ada sarjana bekerja, Pak. Tapi pertanyaan saya ini, urusannya jadi Kementerian Koperasi dan UMKM *gimana* ini tumpang-tindih sama Kementerian Sosial. Ya, ya, saya tahu pasti ada bedanya, tapi titik temunya di mana ini?

DEPUTI BIDANG USAHA MIKRO (DR. YULIUS, M.A.):

Jadi *gini*, Pak, jadi kalau Kementerian Sosial, mereka mengasih bansos ya. Nah, kalau kita, bukan memberikan bansos, kita memberikan pendidikan, pendampingan kepada orang di sekitar, pelaku usaha yang sekitar kemiskinan ekstrem itu. Jadi kita membantu mereka dengan harapan kita nanti bisa menyerap tenaga kerja dari orang yang kemiskinan.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Iya, jadi intinya *kan gini nih*, ada wilayah miskin, lalu orang yang sudah punya usaha atau berusaha kita bantu supaya lebih bagus. Yang beli siapa kalau orang miskin semua di sana? Sebentar, itu canda, tapi mungkin Mas boleh pikirkan ya.

Yang kedua, enggak benar bahwa bansos, Kemensos hanya bantu. Enggak, mereka punya tempat-tempat pelatihan, Pak, di Kalimantan Selatan, segala macam, banyak, jadi enggak benar juga, makanya saya mau tanya tadi titik temunya di mana. Kalau Kemensos mungkin langsung warga miskinnya, mereka juga punya *champion-champion* sudah naik. Bapak dari sisi yang sudah ada, *kan* itu *tuh* titik temunya harusnya, jadi tersisa, terciptalah ekosistem. Karena kalau orang difabel tidak di, di bantu juga, hanya dikasih bansos, *kan* orang enggak cukup hanya makan, Pak.

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (Drs. TETEN MASDUKI):

Jadi ini kan Kepres Pengetasan Kemiskinan itu *by* Kepres, jadi kami salah satu menjadi bagian menteri yang dilibatkan dalam pengentasan

kemiskinan. Nah, tentu beda masing-masing, ya kalau kami tentu lewat mekanisme ekonomi, jadi ada pemberdayaan, bagaimana menciptakan lapangan kerja di sana, sehingga si miskin bisa bekerja.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Saya *ngerti*, Pak Menteri, maaf, saya potong.

Makanya saya tanya tadi *kan* titik temunya, iya *toh*, titik temunya di mana *nih*, barang *kan* masing-masing punya urusan, apakah misalnya *nih* untuk jadi lebih mudahnya *aja*, *oke* tempat yang ditentukan ada kolaborasi enggak di situ, katakanlah kabupaten ini, kecamatan ini warga miskin, ada *collaborative effort* enggak antara Kementerian Koperasi UMKM dengan kementerian, katakan, Kementerian Kemensos dengan Kementerian Perindustrian, itu *loh* maksud saya, supaya ini enggak jadi kompartemen yang justru satu kerja di wilayah timur, satu wilayah barat, enggak tuntas.

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (Drs. TETEN MASDUKI):

Iya, jadi ini dikoordinasi di kantor Wapres, di bawah Menteri PMK, jadi kami dibagi-bagi. Kami menggunakan anggaran kementerian, kami mengajukan anggaran sendiri-sendiri.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Justru itu, kalau begitu, Pak Menteri, kalau itu justru salah, bukan dibagi, harusnya dikolaborasi, supaya jelas jadi wilayah *champion*-nya mana, kemudian bisa diduplikasi oleh pemerintah daerah, provinsi, dan lain-lain.

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (Drs. TETEN MASDUKI):

Betul, betul, jadi ini *kan* tidak sendiri, tidak sendiri, kami dikoordinasi, kami melakukan ini, melakukan.

DEPUTI BIDANG USAHA MIKRO (DR. YULIUS, M.A.):

Ini saya mau *tambahin*, Pak, Bu, Pak Menteri.

Jadi ini *kan* merupakan kebijakan, kegiatan bersama, Pak, jadi bersama kita sudah mengkoordinasikan beberapa kementerian. Pertama, kita menentukan titik-titiknya, setelah itu kita sampaikan kepada Kementerian “Oh kita mau mengadakan kegiatan di sini”, melakukan kegiatan di sini dan kita bersama-sama melakukan itu, jadi sudah terkoordinasi, ini yang, yang dan nanti di mana.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Feeling, feeling saya, itu masih sama-sama kerja, belum *collaborative effort*.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, SE., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Ya ini diterima *aja*, Pak, sebagai masukan, diterima *aja*.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Pak, Pak, saya, saya tahu persis kemiskinan-kemiskinan, kayak di dapil saya, saya tahu *tuh* desa-desa yang punya menjadi kemiskinan ekstrem itu sudah terdaftar di pemerintah, Bappenas, *kan gitu*, Pak. Turunnya bantuan dari pemerintah ya kepada desa-desa itu, *kan* begitu Pak, kayak kemarin *nih* saya dapat bantuan bedah rumah ya, diutamakan kasihnya yang ke kemiskinan ekstrem. Yang saya tanyakan, ada juga di Bapak *nih*, tadi itu *kan* menjawab pertanyaan saya sebenarnya apa yang Bapak lakukan, karena saya tidak pernah dengar mitra saya Kementerian UMKM ini melakukan sesuatu di dapil saya di desa-desa yang terkategorikan kemiskinan ekstrem, kalau ada, saya *kan* pengen tahu, Pak, di desa mana, *kan* begitu, Pak.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, SE., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Pak, Pak, *udah* di, di percepat *aja* ya.

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (Drs. TETEN MASDUKI):

Anggarannya kecil sekali, 57 miliaran.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, SE., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Oh kecil banget, se-Indonesia 57 miliar mau buat apa.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Makanya saya pasti sudah nebaknya ke sana Mas, Pak Menteri, makanya saya lebih, Mbak Evita bentar, makanya saya lebih sepakat kalau ambillah 1, 2, 3 kota atau kecamatan yang menjadi *champion project*, jadi *pilot project*. Daripada dana itu *scattered* ke mana-mana, tidak kolaboratif, enggak ada juga hasilnya *gitu loh* kalau menurut saya, ya, Pak, ya.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, SE., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Baik, cukup ya, Pak Menteri ya, cukup ya?

Baik, dengan tanggapan Pak Menteri dan seluruh jajaran, saya sudah bisa bacakan kesimpulan rapat pada hari ini, nanti silakan kalau memang belum terakomodir, silakan ditambah.

Satu, tampilkan.

1. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan Menteri Koperasi dan UKM UMKM RI terkait Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM RI Tahun Anggaran 2023 dan mengapresiasi capaian tahun 2023 sebesar 97,80% oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI.

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

2. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Koperasi dan UKM RI untuk berkoordinasi dengan Pimpinan DPR RI,

Ini sekarang kita yang minta, Pak, dulu, dulu kita yang berkoordinasi sekarang kita minta Bapak berkoordinasi.

dengan Pimpinan DPR RI dan lembaga terkait lainnya agar melanjutkan agenda pembahasan atas rancangan Undang-Undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.

Ya keburu enggak keburu ya, diusahakan dulu lah, enggak apa-apa kalau dulu kan enggak mengenal *carry over* sekarang kan *carry over*, dikejar semampunya, setuju ya?

(RAPAT:SETUJU)

3. Komisi VI DPR RI mengapresiasi Kementerian Koperasi dan UKM RI atas dibukanya pabrik Minyak Makan Merah di Kabupaten Deli Serdang yang sudah diresmikan oleh Bapak Presiden RI pada 14 Maret 2020, 2024 lalu.

Enggak ada tambahannya ini?

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Ada *dong*, tidak hanya, mengapresiasi sudah oke, dan meminta untuk, "Komisi VI meminta agar Kemenkop RI mengeskalasi program tersebut secara optimal", begitu kira-kira.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, SE., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Oke, prinsipnya itu.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Di tempat lain.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, SE., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Nah prinsipnya itu, setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

4. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Koperasi dan UKM RI untuk melakukan evaluasi atas implementasi Program Kredit Usaha Rakyat melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya.

Setuju ya, tadi Pak Menteri sudah jelaskan ini.

(RAPAT: SETUJU)

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Sebentar, ini tadi kan kita diskusi dengan Menteri BUMN, ini KUR termasuk yang tadi untuk hapus buku dan tagih?

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, SE., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Termasuk.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Nah ini harus kita cantumkan di sini supaya berkoordinasi dengan Himbara, Kementerian BUMN, Mas, supaya *nyambung* dengan sesi tadi.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, SE., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Silakan ditambahkan kata-katanya. Cukup ya, sudah terakomodir lah dengan. *Udah, udah* lembaga terkait lainnya sudah, oke, sudah, sudah saya ketok.

5. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Koperasi dan UMK RI untuk memberikan jawaban secara tertulis.

Ya oke.

(RAPAT: SETUJU)

Baik, Pak Menteri, ada *closing statement*? Cukup?

Baik, dengan demikian berakhir sudah, berakhir sudah rapat kerja kita kali ini. Dengan mengucapkan *alhamdulillahirabbil alamin*, saya nyatakan rapat ini ditutup.

(KETUK PALU 3 KALI)
(RAPAT DITUTUP PUKUL 17.56 WIB)

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

DEWI RESMINI, S.E., M.Si.
NIP. 197104071992032001